

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Pendidikan merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni pemerintah mengupayakan untuk *"mencerdaskan kehidupan bangsa."* Amanat ini mempunyai konsekuensi cukup besar dalam upaya pembangunan sumberdaya manusia yang berkarakter melalui pembangunan pendidikan secara umum. Untuk lebih operasional dalam rangka mewujudkan keterlaksanaan program pendidikan, maka pemerintah telah menetapkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Secara Nasional ada tiga masalah utama dalam bidang pendidikan yang menjadi isu pokok, yakni pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta tata kelola dan pencitraan publik. Untuk menyikapi masalah tersebut diperlukan langkah-langkah mendasar, konsisten dan sistematis serta komitmen dari semua pihak.

Sebagai implikasi dari masalah tersebut, perencanaan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha memecahkan masalah pendidikan tersebut. Dalam hubungan ini, perencanaan pendidikan yang akurat dalam arti luas sangat mempengaruhi hasil yang akan dicapai. Perlu disadari bahwa pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan juga melibatkan komponen masyarakat sebagai bagian dari *stakeholders* pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan jangka waktu perencanaan, maka setiap daerah otonom minimal wajib menyusun tiga jenis perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Sementara itu masing-masing SKPD harus menjabarkan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen perencanaan dengan memadukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Kementerian.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan menetapkan kebijakan pembangunan untuk lima tahun ke depan (2013-2018), penetapan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir karena pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini masih menyisakan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, social, dan fisik peserta didik, sehingga tujuan pembangunan pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Selatan dapat kita wujudkan.

Dan lebih operasional tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD. Di samping berdasarkan konsepsi di atas dan dengan adanya paradigma baru dalam pembangunan termasuk pembangunan pendidikan, yaitu adanya perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyiapkan perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Daerah masing-masing.

1.2 Landasaan Hukum

Sebagai dasar hukum untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah:

- a. Undang-Undang tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- c. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025
- h. RPJMD tahun 2013-2018

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam dua tahun terakhir ini telah banyak terjadi perubahan mendasar dalam tatanan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang sangat menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa depan, rencana pembangunan lima tahun kedepan merupakan konsensus dan komitmen bersama untuk menyatukan pandangan, sikap dan langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun kedepan. Salah satu pilar pembangunan di Sumatera Selatan adalah pembangunan sumber daya manusia yang berarti peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan suatu upaya strategis yang harus dilakukan

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk mewujudkan suatu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan acuan dalam melaksanakan program setiap tahun anggaran yang pada akhirnya dapat diharapkan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Pendidikan lebih menekankan transformatif yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan masyarakat ke arah kemajuan dengan tanpa mengabaikan gerak perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan harus terus

menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi regional, nasional, internasional, dan global termasuk perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik menuju ke desentralistik. Otonomi daerah secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, partisipasi, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip otonomi daerah akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan termasuk didalamnya strategi pengembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pembangunan pendidikan untuk lima tahun kedepan disusun rencana strategi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan jangka menengah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur dan aset yang dikelola
- 2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola
 - 2.2.1. Susunan Kepegawaian
 - 2.2.2. Aset yang dikelola
- 2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok sasaran
 - 2.3.1. Jenis Pelayanan
 - 2.3.2. Kelompok sasaran

Bab III. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD

- 3.1. Gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan SKPD
- 3.2. Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya
- 3.3. Analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Tujuan dan Sasaran
- 4.4. Strategi
- 4.5. Kebijakan

Bab V. Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

a. Tugas Pokok

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 11 tahun 2000 dan Nomor 6 tahun 2003 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Propinsi Sumatera Selatan, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas :

- 1). Melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah yang meliputi kegiatan pembinaan bidang pendidikan dasar, pemuda dan olah raga, kebudayaan serta perguruan tinggi.
- 2). Melaksanakan tugas perbantuan dan tugas lainnya yang diberikan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- 3). Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah Daerah.
- 4). Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi di bidang pendidikan.

b. Fungsi Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- 1). Membina pengelolaan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah umum dan kejuruan serta pendidikan masyarakat.
- 2). Memberikan perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/ Kota
- 3). Membina teknis bidang pendidikan Kabupaten/Kota
- 4). Membina dan mengurus Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan
- 5). Membina urusan tata usaha Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
- 6). Membina pengelolaan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Pendidikan Jasmani.
- 7). Membina dan mengembangkan kebudayaan/bahasa daerah, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan di Sumatera Selatan.

c. Kewenangan

- 1). Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
- 2). Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah.
- 3). Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis.
- 4). Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- 5). Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa dan Balai Pendidikan atau Penataran Guru.
- 6). Penyelenggaraan Museum Provinsi, Suaka Peninggalan Sejarah, Kepurbakalaan, Kajian Sejarah dan Nilai Daerah. Tradisional serta pengembangan Bahasa dan Budaya.

2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan dalam melaksanakan hak dan kewenangannya agar meningkatkan pelayanan, kesejahteraan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan dapat berlangsung dengan baik. Struktur organisasi di lingkungan Dinas Dinas dalam Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Pendidikan merupakan struktur organisasi yang bertujuan menjalankan tugas dan fungsi dari unit-unit organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan. Sebagai landasan tugas masing-unit kerja telah ditetapkan dengan Perda nomor 24 tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Perda nomor 8 Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Jumlah Pegawai :

- Dinas Pendidikan	= 385 orang
- Balai Latihan Teknik (BLPT)	= 22 orang
- Balai Pengembangan PNFI	= 26 orang
- Museum Negeri Sumatera Selatan	= 63 orang
- Balai Teknologi Komonikasi Pendidikan	= 16 orang
- Sekolah Luar Biasa	= 125 orang
- Graha Teknologi	= 10 orang
- Sekolah Olahraga Sriwijaya	= 30 orang
- Pengawas	= <u>6 orang</u>
Jumlah	= 683 orang

Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - Subbagian Ketenagaan
 - Subbagian Keuangan
 - Subbag Umum, dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Program dan Kerjasama Kelembagaan membawahi :
 - Seksi Data dan Penyusunan Program
 - Seksi Mononitroning Evaluasi dan Pelaporan
 - Seksi Kependidikan
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi :
 - Seksi Pembinaan TK/SLB
 - Seksi Pembinaan Sekolah Dasar
 - Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Tinggi membawahi :
 - Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas

- Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi
 - Seksi Pembinaan Sekolah Swasta
6. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Kebudayaan, membawahi :
- Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Jasmani
 - Seksi Kebudayaan
 - Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 5 (lima) UPTD, yaitu :
- Museum Negeri Sumatera Selatan
 - Balai Latihan Pendidikan Teknik
 - Graha Teknologi
 - Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan
 - Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya
 - Sekolah Luar Biasa
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2.2. Aset yang dikelola

Asset Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang masih dikelola adalah:

- 1). Barang Tidak Bergerak (Gedung)
- Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
 - Rumah Dinas Kepala Dinas Jl. Demang Lebar Daun
 - Rumah Dinas Jalan. Mayor Ruslan
 - Gudang Buku Jalan Sako Kenten
 - Gudang Beras Jalan Kebun Duku
 - Gudang Buku Jalan Mayor Ruslan
 - Balai Tekkom Jalan bKS. Tubun
 - Balai Pengembangan Pelatihan Non Formal dan Informal
 - Museum Negeri Jalan.Sriwijaya, Museum TPKS, dan Museum Tekstil
 - Balai Latihan Pendidikan Teknik Jalan. Basuki Rahmad
 - Graha Teknologi Jaka Baring
 - Sekolah Olahraga Sriwijaya Jaka Baring
 - Taman Pendidikan Anak Usia Dini Jaka Baring
- 2). Barang Bergerak (Kendaraan Bermotor)
- Kendaraan Roda 4 (empat)
- Sedan = 1 unit
 - Minibus = 11 unit
 - Bus = 1 unit
 - Pick Up = 1 unit
- Kendaraan roda 2 (dua)
- Sepeda Motor = 14 unit

2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

2.3.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah Pelayanan bidang Pendidikan. Kebijakan pembangunan di Sumatera Selatan antara lain adalah peningkatan mutu SDM yang diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pelaksanaan amanat undang-undang bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu yang merupakan hak setiap warga negara

2.3.2. Kelompok Sasaran

Pelayanan bidang Pendidikan untuk anak usia pra-sekolah dan usia sekolah

- TK/PAUD
- Pendidikan Dasar 9 Tahun
 - SD/MI
 - SMP/MTs
- Pendidikan Menengah
 - SMA/MA
 - SMK
- Pendidikan Non Formal dan Informal
 - Kegiatan Belajar Paket A Setara SD
 - Kegiatan Belajar Paket B Setara SMP
 - Kegiatan Belajar Paket C Setara SMA
 - Kegiatan Pendidikan Keaksaraan
 - Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup
 - Kegiatan Pengarustamaan Gender

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1. Gambaran Umum

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : Faktor geografis yang mencakup antara lain aspek keadaan alam dan sumber daya alam dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini mungkin bersifat menunjang dan mungkin bersifat menghambat, tersedianya sumber daya alam jelas merupakan faktor yang menunjang pendidikan. Keadaan geografis yang tidak menguntungkan antara lain keadaan pemukiman penduduk yang terpencar-pencar dan terpencil serta penduduk padat. Keadaan ini merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Faktor ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia oleh karena itu pembangunan dibidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan sumber daya memegang peranan penting dan sangat mempengaruhi oleh faktor dan kondisi ekonomi masyarakat. Melalui pendidikan di harapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas sebagaimana dicita-citakan.

Faktor sosial budaya merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung dan mendorong percepatan pembangunan bidang pendidikan. Budaya gotong royong dan rasa kebersamaan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan dan merelisasikan pembangunan dibidang pendidikan sehingga kualitas dan kualitas pendidikan yang dicita-citakan dapat diwujudkan/dapat tercapai.

Disamping ketiga faktor tersebut juga faktor-faktor lain seperti belum efektifnya sistem reward dan punishment serta daya saing sumber daya pendidikan, pengaruh perkembangan globalisasi dan pasar bebas yang semakin meningkatkan mempengaruhi pembangunan bidang pendidikan.

1). Keadaan Umum

Batas wilayah provinsi Sumatera Selatan di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Jambi, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Lampung dan sebelah barat berbatasan dengan provinsi Bengkulu.

Daerah tersebut dilalui beberapa sungai-sungai yang terkenal dengan sebutan Batanghari sembilan, di antaranya adalah sungai Musi, sungai Komering, sungai Ogan, sungai Lematang, sungai Lakitan, sungai Rupit, sungai Rawas, dan sungai Kelingi. Kebanyakan sungai tersebut bermata air di Bukit Barisan, kecuali sungai Mesuji, sungai Lalan, sungai Banyuasin. Sungai Ogan, sungai Komering, sungai Lematang, sungai Kelingi, sungai Lakitan, sungai Rupit, dan sungai Rawas merupakan anak sungai Musi. Di samping sungai, provinsi Sumatera Selatan juga memiliki beberapa danau, di antaranya danau Ranau dan danau Teluk Gelam.

2). Administrasi Pemerintah daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota yang terdiri atas 149 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 343 kelurahan dan 2.421 desa (termasuk 776 desa tertinggal atau 28,08 persen).

Jumlah penduduk provinsi Sumatera Selatan sebesar 6.755.582 orang yang tersebar di 14 kabupaten/kota dengan luas wilayah 87.017,42 km² sehingga kepadatan penduduk per km² adalah 78 orang. Penduduk yang terbesar adalah kota Palembang (1.332.845 orang) sedangkan yang terkecil adalah kota Pagar Alam (116.163 orang). Luas wilayah yang terbesar terdapat di kabupaten Ogan Komering Ilir (16.905,32 km²) dan yang terkecil adalah kota Palembang (374,03 km²).

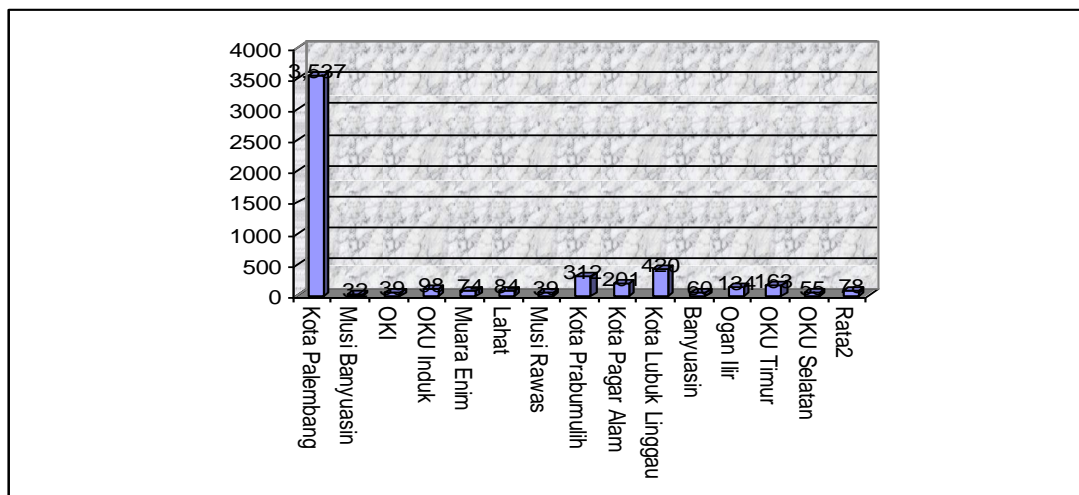
Berdasarkan rata-rata kepadatan provinsi sebesar 78 km² maka kepadatan terbesar terjadi di kota Palembang (3.537 km²) sedangkan kepadatan terkecil terjadi di lima kabupaten, yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, OKU Selatan, dan Banyuasin memiliki kepadatan lebih rendah daripada rata-rata provinsi, masing-masing adalah 32, 39, 39, 55, dan 60 per km² sedangkan 10 kabupaten/kota lainnya memiliki kepadatan lebih besar dari rata-rata provinsi.

Tabel 1
Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007

No.	Kabupaten	Penduduk	Luas Daerah	Kepadatan (Km ²)
1	Kota Palembang	1.332.845	374,03	3.563
2	Musi Banyuasin	467.723	14.477,00	32
3	OKI	660.555	16.905,32	39
4	OKU	287.327	2.917,60	98
5	Muara Enim	633.875	8.587,94	74
6	Lahat	554.061	6.632,50	84
7	Musi Rawas	470.230	12.134,57	39
8	Kota Prabumulih	131.336	421,62	312
9	Kota Pagar Alam	116.163	579,16	201
10	Kota Lubuk Linggau	176.114	419,80	420
11	Banyuasin	734.414	12.142,74	60
12	Ogan Ilir	357.082	2.666,09	134
13	OKU Timur	547.318	3.356,04	163
14	OKU Selatan	296.539	5.403,01	55
15.	Empat Lawang			
	Jumlah	6.765.582	87.017,42	78

Sumber: Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2007

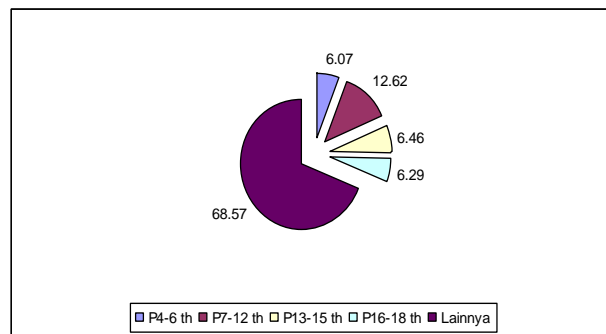
Grafik 1
Kepadatan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007



3). Demografi

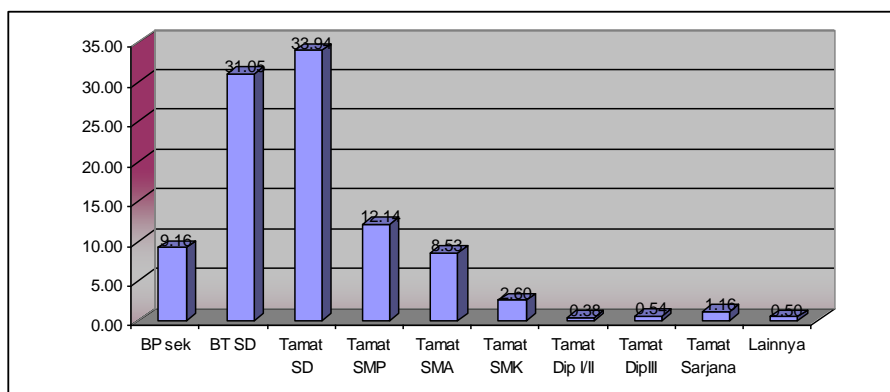
Jumlah penduduk provinsi Sumatera Selatan adalah 6.755.582 orang. Dari jumlah tersebut, 409.790 orang (6,07 persen) berusia 4-6 tahun, 1.008.863 orang (12,62 persen) berusia 7-12 tahun, 436.113 orang (6,46 persen) berusia 13-15 tahun, dan 424.923 orang (6,29 persen) berusia 16-18 tahun sedangkan usia lainnya adalah 4.632.103 orang (68,57 persen). Rata-rata pertambahan penduduk provinsi Sumatera Selatan setiap tahun 1,92 persen.

Grafik 2
Proporsi Penduduk Usia Sekolah
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



Tingkat pendidikan penduduk dirinci menjadi 9 kategori sebagai berikut 1) tidak/belum pernah sekolah sebanyak 618.817 orang (9,16 persen), 2) tidak/belum tamat SD sebanyak 2.097.733 orang (31,05 persen), 3) tamat SD sebanyak 2.292.863 orang (33,94 persen), 4) tamat SMP sebanyak 820.153 orang (12,14 persen), 5) tamat SMA sebanyak 576.053 orang (8,53 persen), 6) tamat SMK sebanyak 175.562 orang (2,60 persen), 7) tamat Diploma I dan II sebanyak 25.786 orang (0,54 persen), 8) tamat Sarjana sebanyak 78.219 orang (1,16 persen) dan 9) lainnya sebanyak 33.996 orang (0,50 persen).

Grafik 3
Tingkat Pendidikan Penduduk
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



4). Geografi

Faktor geografi mencakup keadaan alam dan sumber daya alam (SDA). Keadaan alam meliputi dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga menyebabkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti itu setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. November merupakan bulan dengan curah hujan yang paling banyak. Suhu provinsi Sumatera Selatan menunjukkan variasi $24,6^{\circ}$ sampai 27° Celsius sedangkan kelembabannya bervariasi antara 75 sampai 87 R.H.

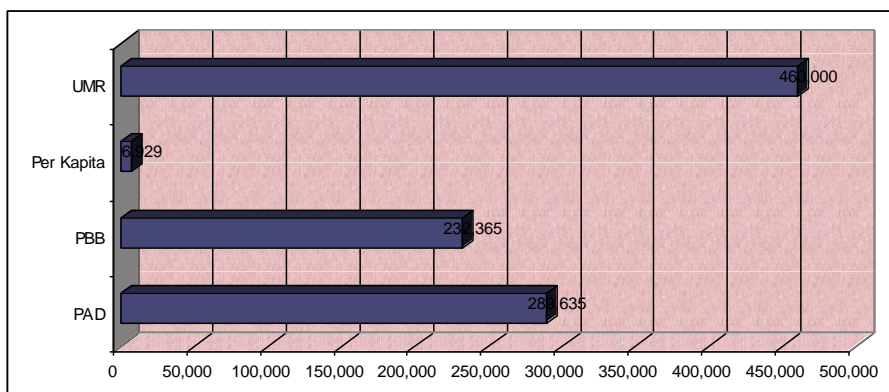
Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan antara 9/7-492/23 mm sepanjang tahun. Setiap bulannya, hujan cenderung turun. Di pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Makin ke barat merupakan dataran rendah yang bergunung-gunung.

SDA yang terkandung di daratan, sungai maupun laut merupakan potensi ekonomi yang besar. SDA yang menjadi andalan adalah minyak bumi, perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan kopi, batubara, pertanian, perikanan, peternakan, flora dan fauna. SDA yang sedang digalakkan sebagai sumber energi alternatif adalah batubara.

5). Ekonomi

Pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Selatan sebesar Rp 289.634.625,00 dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp232.365.405,00 dan rata-rata pendapatan per kapita sebesar Rp6.928.617,00 sedangkan upah minimum regional (UMR) sebesar Rp460.000,00. Jenis komoditi ekspor selama ini yang terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah perkebunan, minyak dan gas bumi, batubara, industri, pertanian dan peternakan.

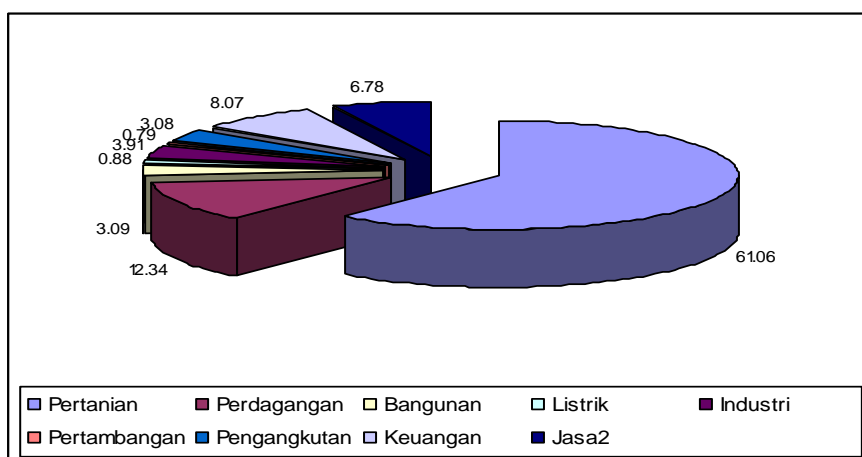
Grafik 4
Keadaan Ekonomi (PAD, PBB, Per Kapita, dan UMR)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



Keterangan: Khusus UMR dalam rupiah, lainnya dalam ribu rupiah

Mata pencaharian penduduk terbesar adalah di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (61,21 persen), perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 12,37 persen, bangunan sebesar 3,09 persen, listrik, gas, dan air sebesar 0,88 persen, industri pengolahan sebesar 3,92 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 0,80 persen, pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi sebesar 6,18 persen, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan tanah, dan jasa perusahaan sebesar 3,09 persen dan jasa-jasa lainnya sebesar 8,45 persen.

Grafik 5
Mata Pencaharian Penduduk menurut Sektor
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



6). Sosial Budaya dan Agama

Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat adalah memegang teguh pada ajaran leluhur (nenek moyang) dan cenderung lambat dalam menerima modernisasi. Dari sejumlah penduduk, yang beragama Islam yang terbesar (96,97 persen), Protestan sebesar 0,78 persen, katholik sebesar 0,76 persen, Hindu sebesar 0,53 persen dan Budha sebesar 0,95 persen. Untuk mengamalkan ibadahnya, pemeluk agama itu didukung oleh 5.527 mesjid dan musholla, 168 gereja, 144 pura, dan 66 vihara.

7). Keadaan Pendidikan

Bahasan tentang keadaan pendidikan akan dirinci menurut tiga jenis, yaitu 1) data pendidikan, 2) indikator pendidikan, dan 3) analisis indikator. Ketiga jenis bahasan tersebut menggunakan 4 jenjang pendidikan, yaitu 1) Taman Kanak-kanak (TK), 2) tingkat Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), 3) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdiri dari SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 4) tingkat Sekolah Menengah (SM) yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk selanjutnya, yang dimaksud tingkat SD adalah SD dan MI, tingkat SMP adalah SMP dan MTs, dan tingkat SM adalah SMA, MA, dan SMK.

8). Data Pendidikan

Provinsi Sumatera Selatan terdapat 8 jenis pendidikan persekolahan, yaitu 1) TK, 2) SD, 3) MI, 4) SMP, 5) MTs, 6) SMA, 7) MA, dan 8) SMK. Dari sejumlah sekolah tersebut, SD (4.476) merupakan sekolah yang terbanyak diikuti SMP, TK,

MI, SMA, MTs, SMK, dan MA. Jumlah sekolah yang terkecil adalah MA (133). Seperti jenis sekolah di daerah lainnya, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Data pendidikan yang dimaksud di atas disajikan pada Tabel 2 dan 3. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2005/2006, jumlah TK sebesar 817 sekolah, siswa baru sejumlah 13.640, siswa seluruhnya sejumlah 39.951 orang, dan lulusan 17.835 orang. Data pada SD dan MI sejumlah 4.904 sekolah, siswa baru kelas I sejumlah 175.332, siswa seluruhnya sejumlah 959.248, dan lulusan sejumlah 136.550. Data pada SMP dan MTs sejumlah 1.254 sekolah, siswa baru kelas I sejumlah 116.191, siswa seluruhnya sejumlah 325.987, dan lulusan sejumlah 116.432. Data pada SMA, SMK, dan MA sejumlah 657 sekolah, siswa baru kelas I sejumlah 80.491, siswa seluruhnya sejumlah 210.154, dan lulusan sejumlah 72.504.

Tabel 2
Siswa Baru Tingkat I, Siswa, Lulusan, dan Guru
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007

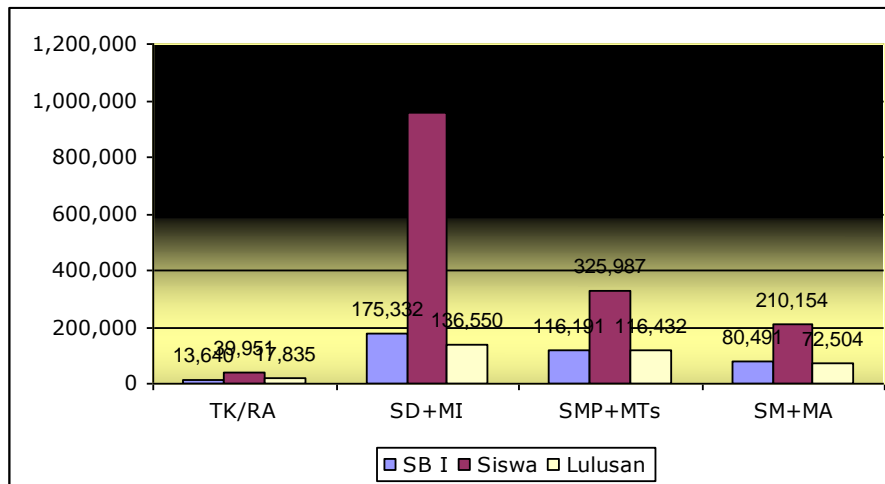
No.	Jenis Sekolah	Siswa Baru kelas	Siswa	Lulusan	Guru
1.	TK	13.640	39.951	17.835	4.335
2.	SD+MI	175.332	959.248	136.550	59.216
	a. SD	163.545	903.189	124.201	55.557
	b. MI	11.787	56.059	12.349	3.659
3.	SMP+MTs	116.191	325.987	116.432	24.186
	a. SMP	98.151	277.720	103.741	19.917
	b. MTs	18.040	48.267	12.691	4.269
4.	SM+MA	80.491	210.154	72.504	17.321
	a. SMA	51.790	148.402	51.718	11.610
	b. MA	7.327	20.067	5.130	1.850
	c. SMK	21.374	41.685	15.656	3.861

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2007, Provinsi Sumatera Selatan

Bila dibandingkan antara siswa SD dan MI yaitu 903.189 dan 56.059 maka jumlah siswa SD 16 kali lebih besar daripada siswa MI. Hal ini juga disebabkan karena jumlah SD juga lebih besar daripada MI (4.476 dan 428 sekolah). Selanjutnya, jika dibandingkan antara siswa SMP dan MTs yaitu 277.720 dan 48.267 maka jumlah siswa SMP hampir 6 kali dari siswa MTs.

Bila dibandingkan antara siswa SMA dengan SMK yaitu 148.402 dan 41.685, ternyata jumlah siswa SMA 3,5 kali lebih besar dibandingkan dengan SMK. Demikian juga, jumlah SMA lebih besar 2,9 kali dari jumlah SMK (389 dan 135 sekolah). Hal ini menunjukkan minat siswa bersekolah di SMA lebih besar dibandingkan dengan SMK atau masalah lain karena SMK hanya ada 135 sehingga siswa pilihan menjadi berkurang dibandingkan dengan SMA. Dari segi masyarakat, kelihatannya terdapat perbedaan antara orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SMA atau SMK. Sesuai dengan banyaknya siswa yang ada, lulusan SMA juga lebih banyak yaitu 51.718 jika dibandingkan dengan lulusan SMK yaitu 15.656. Selain itu, walaupun jumlah MA (135) hampir sama dengan SMK, siswa SMK 2 kali lebih besar daripada MA (20.067).

Grafik 6
Siswa Baru kelas I, Siswa, dan Lulusan menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



Selanjutnya, bila dibandingkan antara jumlah siswa SMA dan MA dengan SMK maka jumlah siswa SMA dan MA sebesar 80,2 persen dan SMK sebesar 19,8 persen. Oleh karena itu, jika kebijakan pemerintah mengharuskan jumlah siswa SMK lebih besar daripada SMA dan MA maka untuk provinsi Sumatera Selatan akan sulit dapat dicapai karena kondisi sekarang sangat jauh berbeda. Apalagi jika diharuskan mencapai 70:30 artinya SMK sebesar 70 persen dan SMA dan MA sebesar 30. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi walau dengan kebijakan sekali pun.

Untuk menampung sejumlah siswa TK (39.351), tersedia 817 sekolah dan ruang kelas 2.457 serta kelas sejumlah 2.432 sehingga terdapat 25 ruang atau 1,01 persen ruang kelas yang ada belum digunakan. Sebaliknya, untuk siswa di SD dan MI (959.248) ditampung oleh sejumlah 4.904 sekolah dan 31.450 ruang kelas dengan kelas sejumlah 35.097 sehingga terdapat 3.647 ruang atau 11,6 persen ruang kelas yang ada digunakan lebih dari sekali. Kondisi ini menunjukkan kurangnya jumlah ruang kelas di SD dan MI yang lebih dari 10 persen. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih lanjut dalam penambahan ruang kelas di SD dan MI karena SD dan MI termasuk dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Tabel 3
Sekolah, Ruang Kelas, dan Kelas menurut Jenis Sekolah
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007

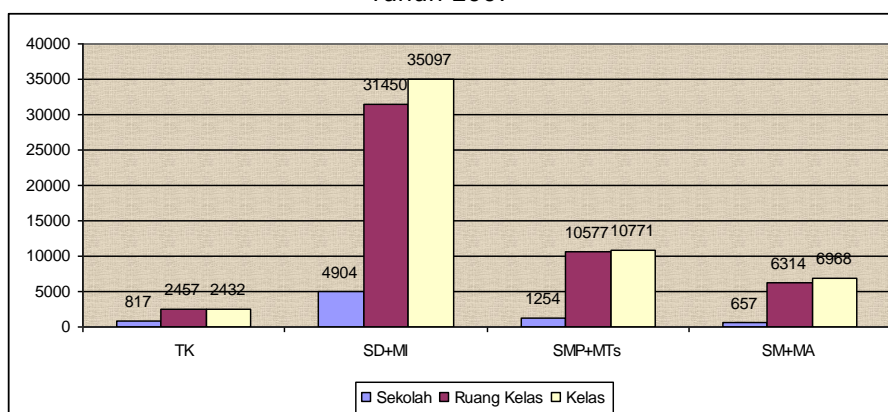
No.	Jenis Sekolah	Sekolah	Ruang Kelas	Kelas (Rom-bongan Belajar)
1.	TK	817	2.457	2.432
2.	SD+MI	4.904	31.450	35.097
	a. SD	4.476	29.033	32.671
	b. MI	428	2.417	2.426
3.	SMP+MTs	1.254	10.577	10.771
	a. SMP	905	9.125	9.124
	b. MTs	349	1.452	1.647
4.	SM+MA	657	6.314	6.968
	a. SMA	389	4.108	4.652
	b. MA	133	664	675
	c. SMK	135	1.542	1.641

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2007, Provinsi Sumatera Selatan

Hal yang sama untuk menampung siswa SMP dan MTs (325.987), tersedia 1.254 sekolah dan ruang kelas sejumlah 10.577 dengan jumlah kelas sejumlah 10.771 sehingga terdapat 194 ruang atau 1,83 persen ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini menunjukkan kurangnya jumlah ruang kelas di SMP dan MTs walaupun kurang dari 2 persen. Namun, karena SMP dan MTs termasuk dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka kekurangan tersebut hendaknya dapat dipenuhi.

Untuk menampung siswa SMA, MA, dan SMK (210.154), tersedia sejumlah 657 sekolah dan ruang kelas sejumlah 6.314, dengan jumlah kelas sejumlah 6.968 sehingga terdapat 654 ruang kelas atau 10,36 persen yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan proses belajar mengajar. Kondisi ini menunjukkan kurangnya jumlah ruang kelas di SM dan MA karena sudah lebih dari 10 persen. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan maka kekurangan 10 persen itu hendaknya diperhatikan oleh pemerintah setempat.

Grafik 7
Sekolah, Ruang Kelas, dan Kelas menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



Tabel 4
Jumlah Guru menurut Kelayakan Mengajar dan Jenis Sekolah
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007

No.	Jenis Sekolah	Blm sertifikasi		Sertifikasi		Jumlah
		Jml	%	Jml	%	
1.	TK	3.895	89,85	440	10,15	4.335
2.	SD+MI	58.652	99,05	564	0,95	59.216
	a. SD	55.150	99,27	407	0,73	55.557
	b. MI	3.502	95,71	157	4,29	3.659
3.	SMP+MTs	8.625	35,66	15.561	64,34	24.186
	a. SMP	6.123	30,74	13.794	69,26	19.917
	b. MTs	2.502	58,61	1.767	41,39	4.269
4.	SM+MA	4.647	26,83	12.674	73,17	17.321
	a. SMA	3.262	28,10	8.348	71,90	11.610
	b. MA	15	0,81	1.835	99,19	1.850
	d. SMK	1.370	35,48	2.491	64,52	3.861

Sumber: LPMP Sumatera Selatan

Jumlah guru menurut kelayakan mengajar dapat dilihat pada Tabel 4. Jumlah guru layak yang terbaik terdapat di tingkat SM sejumlah 73,17 persen dan di tingkat SMP sejumlah 64,34 persen sedangkan guru layak yang terkecil terdapat di SD

sejumlah hanya 0.73 persen. Kecilnya guru layak di tingkat SD karena adanya perbaikan kualifikasi bahwa guru tingkat SD yang layak adalah mereka yang memiliki ijazah Sarjana/S1 atau Diploma 4. Sebaliknya, guru yang tidak layak mengajar di tingkat SD menunjukkan angka yang paling besar yaitu 99,05 persen dan yang terendah adalah tingkat SM yaitu 26,83 persen. Kondisi kelayakan mengajar ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru.

Guru yang mengajar di TK sejumlah 4.335 di antaranya adalah 3.895 orang (89,85 persen) tidak layak mengajar dan 440 orang (10,15 persen) layak mengajar. Guru yang mengajar di SD dan MI sejumlah 59.216 di antaranya adalah 58.652 orang (99,05 persen) tidak layak mengajar dan 564 orang (0,95 persen) layak mengajar. Guru yang mengajar di SMP dan MTs sejumlah 24.186 di antaranya adalah 8.625 orang (35,66 persen) tidak layak mengajar dan 15.561 orang (64,33 persen) layak mengajar. Guru yang mengajar di SMA, SMK dan MA sejumlah 17.321 orang adalah 4.647 orang (26,83 persen) tidak layak mengajar dan 12.674 orang (73,17 persen) layak mengajar. Berdasarkan ruang kelas yang terdapat pada Tabel 5, ternyata semua sekolah memiliki ruang kelas yang rusak berat. Dengan kondisi seperti ini berarti, semua sekolah masih membutuhkan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas walaupun dengan jumlah yang bervariasi.

Tabel 5
Jumlah Ruang Kelas Milik menurut Kondisi dan Jenis Sekolah
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007

No.	Jenis Sekolah	Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		Jumlah Milik
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1.	TK	2.135	86.89	209	8.51	113	4.60	2.457
2.	SD+MI	14.109	44.86	9.361	29.76	7.980	25.37	31.450
	a. SD	13.139	45.26	8.506	29.30	7.388	25.45	29.033
	b. MI	970	40.13	855	35.37	592	24.49	2.417
3.	SMP+MTs	8.895	84.10	1.250	11.82	432	4.08	10.577
	a. SMP	7.965	87.29	901	9.87	259	2.84	9.125
	b. MTs	930	64.05	349	24.04	173	11.91	1.452
4.	SM+MA	5.738	90.88	397	6.29	179	2.83	6.314
	a. SMA	3.853	93.79	186	4.53	69	1.68	4.108
	b. MA	418	62.95	146	21.99	100	15.06	664
	c. SMK	1.467	95.14	65	4.22	10	0.65	1.542

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2007, Provinsi Sumatera Selatan

Ruang kelas yang baik terbesar dimiliki oleh tingkat SM yaitu 5.738 (90,88 persen) dan yang terkecil terdapat pada tingkat SD yaitu 14.109 (44,86 persen). Sebaliknya, ruang kelas rusak berat yang terbesar juga terdapat di tingkat SD yaitu 7.980 (25,37 persen) dan yang terkecil juga terdapat di tingkat SM yaitu 179 (2,83 persen). Dengan melihat kondisi seperti ini maka makin tinggi jenjang pendidikan kelihatannya prasarana yang digunakan makin bagus kualitasnya. Hal ini akibat letak sekolah tingkat SM yang kebanyakan berada di daerah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau.

Berdasarkan data ruang kelas tersebut maka untuk TK terdapat 2.457 ruang kelas dan 2.135 ruang (86,89 persen) dalam kondisi baik, 209 ruang (8,51 persen) rusak ringan, dan 113 (4,60 persen) rusak berat. Untuk SD dan MI sejumlah 31.450 ruang, ternyata 14.109 ruang (44,86 persen) dalam kondisi baik, 9.361 ruang (29,76 persen) dalam kondisi rusak ringan, dan 7.980 ruang (25,37 persen) dalam kondisi rusak berat. Untuk SMP dan MTs sejumlah 10.577 ruang, ternyata 8.895 ruang (84,10 persen) dalam kondisi baik, 1.250 ruang (11,82 persen) dalam kondisi rusak ringan dan 432 ruang (4,08 persen) dalam kondisi rusak berat. Untuk SM dan MA

sejumlah 6.314 ruang, ternyata 5.738 ruang (90,88 persen) dalam kondisi baik, 397 ruang (6,29 persen) dalam kondisi rusak ringan, dan 179 ruang (2,83 persen) dalam kondisi rusak berat.

3.2. Hasil-Hasil yang dicapai

Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tiga kebijakan tersebut diatas. Sebagai gambaran hasil pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

1). Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan yang positif, berdasarkan data yang ada APK, APM dan Angka Transisi dari Sekolah Dasar ke Sekolah Menengah Pertama meningkat setiap tahun. Disamping itu, angka putus sekolah mengalami penurunan, berikut tabel perkembangan prosentase (%) APM, Angka Putus Sekolah SD/MI, Paket A. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kenaikan prosentase APM pada tahun 2004 dan 2008 dari seluruh jenis sekolah dasar di Sumatera Selatan sehingga secara keseluruhan meningkat 6,82 % dan diharapkan pada tahun 2009 APM Sekolah Dasar di Sumatera Selatan akan mencapai target 95 % Untuk perkembangan APK SD/MI telah mencapai diatas 100%, APM, dan angka putus sekolah dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 1 perkembangan APK, APM, SD/MI, SDLB dan angka putus sekolah

No	Indikator	2004	2005	2006	2007	2008
1.	APK	100,45%	106,97%	101,53%	107,79%	106,64%
2.	APM	88,02%	90,21%	92,21%	94,22%	94,84%
3.	Angka Putus Sekolah	0,98%	0,90%	0,84%	0,74%	0,65%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat perkembangan yang positif untuk jenjang sekolah dasar. Terhadap penyelenggaraan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk jenjang SMP/MTs dapat kita lihat seperti tabel 3 berikut:

Tabel 2 perkembangan APK, APM, angka putus sekolah dari SMP/MTs, SMPLB di Sumatera Selatan

No	Indikator	2004	2005	2006	2007	2008
1.	APK	79,69%	80,69%	86,95%	91,58%	93,18%
2.	APM	70,54%	72,16%	74,43%	76,73%	79,42%
3.	APS	83,57%	84,96%	87,57%	89,26%	90,84%
4.	Angka Putus Sekolah	1,63%	1,61%	1,60%	1,45%	1,15%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat perkembangan yang positif untuk jenjang SMP/MTs sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, yaitu:

- a) APK di Sumatera Selatan meningkat sebesar 13.49 % dari 79,69 % pada tahun 2004 menjadi 93.18 % pada tahun 2008. Terdapat kenaikan rata-rata APK per tahun sebesar 2,69%

- b) APM di Sumatera Selatan meningkat sebesar 8,88 % dari 70,54 % pada tahun 2004 menjadi 79,42% pada tahun 2008, terjadi kenaikan rata-rata APM per tahun sebesar 1,77 %
- c) Terjadi penurunan angka putus sekolah sebesar 0,48 % dari 1,63 % pada tahun 2004 menjadi 1,15 % pada tahun 2008, terjadi penurunan angka putus sekolah rata-rata 0,48 % pertahun.

2). Pendidikan Menengah

Pada jejang pendidikan SMA/MA/SMK perkembangan persentase (%) APK, APM dan angka putus sekolah di Sumatera Selatan dapat kita lihat seperti tabel berikut:

Tabel 4 perkembangan APK, APM, angka putus sekolah dari SMA/MA/SMK di Sumatera Selatan

No	Indikator	2004	2005	2006	2007	2008
1.	APK	53,92%	56,28%	63,72%	69,48%	72,02%
2.	Angka Mengulang	1,21%	0,96%	0,71%	0,46%	0,38%
3.	Angka Putus Sekolah	1,68%	1,24%	1,18%	1,16%	1,12%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perkembangan yang positif terhadap penyelenggaraan Pendidikan Menengah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 yaitu:

- a) APK di Sumatera Selatan meningkat sebesar 18,10 % dari 53,92 % pada tahun 2004 menjadi 72,02 % pada tahun 2008. Terdapat kenaikan rata-rata APK per tahun sebesar 3,62%
- b) Angka Mengulang di Sumatera Selatan terjadi penurunan sebesar 0,83 % dari 1,21 % pada tahun 2004 menjadi 0,38 % pada tahun 2008, terjadi penurunan rata-rata angka mengulang per tahun sebesar 0,16 %
- c) Terjadi penurunan angka putus sekolah sebesar 0,56 % dari 1,68 % pada tahun 2004 menjadi 1,12 % pada tahun 2008, terjadi penurunan angka putus sekolah rata-rata 0,11 % pertahun.

3). Pendidikan Non Formal dan Informal

Penduduk Buta Aksara usia 15 – 44 Th di Sumatera Selatan selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan dapat dilihat dari tabel dibawah ini

No	Indikator	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Buta Aksara	7,80%	4,1 %	3,78%	3,16%	3,10%

Berdasarkan tabel diatas penduduk buta aksara di Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun terakhir 2004 sampai dengan 2008 mengalami penurunan kurang lebih 4,7% atau 0,94% rata-rata pertahun

4). Tenaga Pendidik

Jumlah guru menurut kelayakan mengajar seperti kondisi diatas, jumlah guru layak yang terbaik terdapat di tingkat SM sejumlah 73,17 persen dan di tingkat SMP sejumlah 64,34 persen sedangkan guru layak yang terkecil terdapat di SD sejumlah hanya 0,95 persen. Kecilnya guru layak di tingkat SD karena adanya perbaikan kualifikasi bahwa guru tingkat SD yang layak adalah mereka yang memiliki ijazah Sarjana/S1 atau Diploma 4. Sebaliknya, guru yang tidak layak mengajar di tingkat SD menunjukkan angka yang paling besar yaitu 99,05 persen dan yang terendah adalah tingkat SM yaitu 26,83 persen. Kondisi kelayakan mengajar ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya pemerintah selama lima tahun terakhir melaksanakan kualifikasi bagi guru di semua jenis dan jenjang pendidikan, selain itu sesuai Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru juga telah dilaksanakan sertifikasi bagi guru sampai dengan tahun 2007 hasil yang telah dicapai seperti tabel berikut:

Tabel
Sertifikasi Pendidik

Kabupaten/Kota	2006				2007			
	PNS		Non-PNS		PNS		Non-PNS	
	PF	PLPG	PF	PLPG	PF	PLPG	PF	PLPG
Banyuasin	11	12			57	174		
Lahat	8	6			53	365		26
Lubuk Linggau	4	5			56	114		
Muara Enim	2	6			21	53		5
Musi Banyuasin	4	1			33	73		1
Musi Rawas					43	147		2
Ogan Ilir	4	4			43	37	1	2
OKI	4	8			86	120		12
OKU	9	7			52	81	1	11
OKU Selatan		4			3	8		1
OKU Timur					8	45		15
Pagar Alam	2	7		2	6	21	1	6
Palembang	32	29			223	442	1	23
Prabumulih	1	7			6	35		2
	81	96	0	2	690	1715	4	106
	177		2		2405		110	
Kuota	179				2515			
PNS	2.582							
Non-PNS	112							
Total	2.694							

5). Ruang Kelas

Berdasarkan data Ruang kelas yang baik terbesar dimiliki oleh tingkat SM yaitu 5.738 (90,88 persen) dan yang terkecil terdapat pada tingkat SD yaitu 14.109 (44,86 persen). Sebaliknya, ruang kelas rusak berat yang terbesar juga terdapat di tingkat SD yaitu 7.980 (25,37 persen) dan yang terkecil juga terdapat di tingkat SM yaitu 179 (2,83 persen). Dengan melihat kondisi seperti ini maka makin tinggi jenjang pendidikan kelihatannya prasarana yang digunakan makin bagus kualitasnya. Hal ini akibat letak sekolah tingkat SM yang kebanyakan berada di daerah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau. Sampai dengan tahun 2007 realisasi rehabilitasi sekolah dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel
Realisasi Rehab Sekolah

NO.	PROPINSI / KOTA / KABUPATEN	RK RUSAK TAHUN 2005	TELAH DIPERBAIKI (S.D.2007)				SISA RK RUSAK PROGRAM 2008	Rehab Tahun 2008
			PUSAT		DAERAH	TOTAL RK		
			DAK (RK)	SUMBER LAIN (RK)	APBD (RK)			
(1)	2	3	4	5	6	7	8	12
	SUMATERA SELATAN	17.413	6.273	1.829	2.040	10.142	7.796	2931
1	Kab. Lahat	542	271	163	-	434	542	217
2	Kab. Musi Banyuasin	1.076	360	116	-	476	600	210
3	Kab. Musi Rawas	1.783	475	193	-	668	1.115	390
4	Kab. Muaraenim	1.830	195	198	750	1.143	687	240
5	Kab. Ogan Komering Ilir	2.113	682	228	427	1.337	776	272
6	Kab. Ogan Komering Ulu	2.052	559	220	-	779	1.273	446
7	Kota Palembang	2.133	197	230	863	1.290	843	295
8	Kota Prabumulih	407	440	44	-	484	-	0
9	Kota Pagar Alam	285	423	31	-	454	-	0
10	Kota Lubuk Linggau	182	462	20	-	482	-	0
11	Kab. Banyu Asin	1.803	774	195	-	969	834	292
12	Kab. OKU Timur	937	549	101	-	650	287	100
13	Kab. OKU Selatan	865	424	44	-	468	397	139
14	Kab. Ogan Ilir	950	462	46	-	508	442	155
15	Empat Lawang	501			-	501	501	175
	TOTAL						7.796	2.931

3.3. Analisa Isu-Isu Strategis

Pembangunan pendidikan tidak dapat lepas dari perkembangan lingkungan strategis, regional, nasional, maupun global. Pendidikan harus dibangun dalam keterkaitan secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan yang memiliki persoalan yang semakin kompleks, dalam dimensi sektoral tersebut pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada SDM dalam rangka menyiapkan tenaga kerja. Dalam lima tahun kedepan pembangunan pendidikan harus dilihat dari perspektif pembangunan manusia seutuhnya yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu: 1) efektif tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur, serta kepribadian unggul, 2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi. Untuk itu dalam penyusunan program pembangunan lima tahun kedepan dapat melihat berbagai kekurangan dan kelemahannya selama ini dengan melihat beberapa indikator antarlain :

1). Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan yang dimaksud disesuaikan dengan Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan yang terdiri dari 3 kebijakan besar, yaitu 1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan 3) akuntabilitas dan pencitraan publik. Untuk menerapkan ketiga kebijakan besar tersebut maka indikator pendidikan yang digunakan juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1) indikator pemerataan, 2) indikator mutu, dan 3) indikator efisiensi.

Indikator pemerataan pendidikan yang digunakan ada 5 jenis, yaitu 1) angka partisipasi kasar (APK), 2) angka penyerapan kasar (ASK) khusus TK dan SD dan

angka melanjutkan (AM) untuk SMP dan SM, 3) rasio siswa per sekolah (R-S/Sek), 4) rasio siswa per kelas (R-S/K), dan 5) rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK).

Indikator mutu pendidikan yang digunakan ada 6 jenis dilihat dari segi sumber daya manusia dan prasarana, yaitu 1) persentase guru layak (%GL), 2) persentase ruang kelas baik (%RKB), 3) persentase perpustakaan (%Perpus), 4) angka lulusan (AL), 5) angka mengulang (AU), dan 6) angka putus sekolah (APS).

Indikator efisiensi pendidikan yang digunakan ada 4 jenis dilihat dari internal pendidikan, yaitu 1) koefisien efisiensi (KE), 2) angka bertahan (AB), 3) rata-rata lama belajar (RLB), dan 4) rasio masukan-keluaran (RMK)

2). Indikator Pemerataan

Untuk melihat partisipasi penduduk yang bersekolah digunakan alat ukur yang disebut APK. APK adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk yang berkesesuaian (Biro Perencanaan, 2002). Untuk TK digunakan penduduk usia 4-6 tahun, untuk tingkat SD digunakan penduduk usia 7-12 tahun, untuk tingkat SMP digunakan penduduk usia 13-15 tahun dan untuk tingkat SM digunakan penduduk usia 16-18 tahun. Makin tinggi nilai APK berarti makin banyak penduduk yang bersekolah. Sebaliknya, makin kecil nilai APK maka makin sedikit penduduk yang bersekolah.

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat diserap di TK dan tingkat SD maka digunakan alat ukur ASK sedangkan untuk melihat siswa yang melanjutkan ke sekolah atau jenjang yang lebih tinggi maka digunakan alat ukur AM. Contoh ASK TK adalah perbandingan antara siswa baru TK dengan penduduk usia 5-6 tahun, ASK tingkat SD adalah antara siswa baru tingkat I tingkat SD dengan penduduk usia 6-7 tahun, AM ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah AM tingkat SMP atau angka melanjutkan ke SMP, dan AM tingkat SM adalah angka melanjutkan ke tingkat SM. AM dapat dihitung dengan menggunakan jumlah siswa baru tingkat I dibagi dengan jumlah lulusan jenjang sebelumnya. AM tingkat SMP dihitung dari jumlah siswa baru tingkat I tingkat SMP dibagi dengan lulusan tingkat SD, AM tingkat SM dihitung dari jumlah siswa baru tingkat I tingkat SM dibagi dengan lulusan tingkat SMP. Makin tinggi nilai AM maka makin banyak lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya, makin kecil nilai AM maka makin sedikit lulusan yang melanjutkan. Idealnya, nilai AM adalah 100 persen berarti semua lulusan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Indikator pemerataan pendidikan lain yang dapat mengukur program pemerataan pendidikan adalah berbentuk rasio dan terdiri dari 3 jenis, yaitu 1) R-S/Sek, 2) R-S/K, dan 3) R-K/RK sesuai dengan jenjang pendidikan.

R-S/Sek adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Rasio ini menunjukkan rata-rata siswa setiap sekolah. Makin tinggi rasionya berarti makin padat sekolah yang ada. Sebaliknya, makin kecil rasionya berarti makin tersebar sekolah yang ada. Oleh karena R-S/Sek makin rendah jenjang pendidikan akan makin kecil.

R-S/K adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah kelas sesuai dengan jenis sekolah. Rasio ini menunjukkan rata-rata siswa setiap kelas. Makin tinggi rasionya berarti makin padat kelas yang ada. Sebaliknya, makin kecil rasionya berarti makin menyebar kelas yang ada. Oleh karena R-S/K makin rendah jenjang pendidikan akan makin kecil.

R-K/RK adalah perbandingan antara jumlah kelas dengan jumlah ruang kelas sesuai dengan jenis sekolah. Rasio ini menunjukkan rata-rata ruang kelas yang dapat digunakan oleh kelas. Makin tinggi rasionya berarti makin banyak ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya, makin kecil rasionya berarti terdapat ruang kelas yang belum digunakan. Idealnya rasionya adalah 1 berarti setiap ruang kelas hanya digunakan sekali.

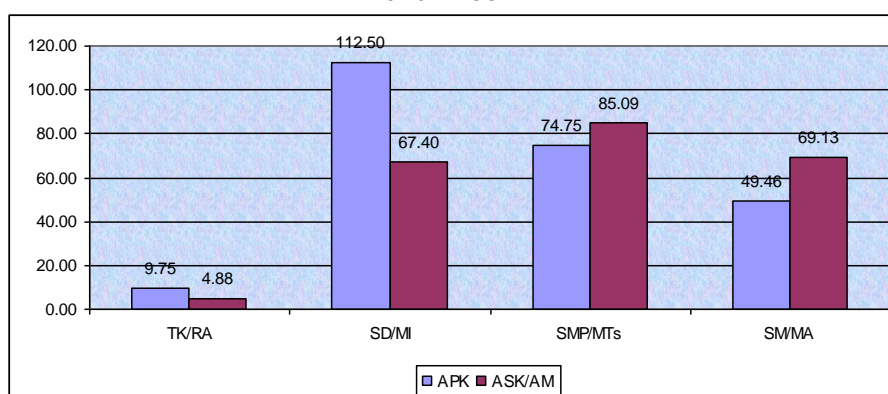
Berdasarkan Tabel 6 untuk APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD yaitu 112,50 persen dan yang terendah di tingkat SM yaitu 49,46 persen. APK TK adalah 9,75 persen dan APK tingkat SMP adalah 74,75 persen. Tingginya APK di tingkat SD adalah akibat banyaknya siswa berusia di luar 7-12 tahun dan anak usia sekolah dari daerah lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat SMP dan SM karena di Provinsi Sumatera Selatan anak yang bersekolah di tingkat SD paling banyak jika dibandingkan dengan tingkat lainnya.

Tabel 6
Indikator Pemerataan Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007

No.	Jenjang	APK (%)	ASK/AM (%)	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK
1.	TK	9.75	4.88	49	16	0.99
2.	SD/MI	112.50	67.40	196	27	1.12
3.	SMP/MTs	74.75	85.09	260	30	1.02
4.	SM/MA	49.46	69.13	320	30	1.10

ASK TK sangat kecil yaitu 4,88 persen sedangkan ASK tingkat SD lebih dari separuh penduduk yang ada yaitu 67,40 persen. Lulusan SD dan MI yang melanjutkan ke SMP dan MTs adalah 85,09 persen berarti masih sekitar 15 persen lulusan yang tidak melanjutkan jika lulusan SD dan MI serta SMP dan MTs ada dalam daerah yang sama. Artinya, lulusan SD dan MI bukan berasal dari kabupaten lainnya. Dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka kondisi ini harus dapat ditingkatkan menjadi 100 persen. Lulusan SMP dan MTs yang melanjutkan ke SM dan MA lebih kecil daripada lulusan SD dan MI yaitu 69,13 persen. Banyaknya AM tingkat SM akibat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya walaupun jumlah sekolah SM (657 sekolah) yang ada kurang mendukung karena sedikit lebih dari separuh SMP dan MTs (1.254 sekolah) yang ada.

Grafik 8
APK dan ASK/AM menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



R-S/Sek sangat bervariasi dan yang terpadat terdapat di tingkat SM yaitu 320 dan terjarang terdapat di TK yaitu 49. Bila menggunakan rata-rata nasional yang ditentukan rata-rata TK adalah 60 siswa maka TK di Provinsi Sumatera Selatan hanya didayagunakan 81 persen. Sekolah yang dibangun untuk tingkat SD yang dapat menampung 240 siswa pada kenyataannya belum didayagunakan seluruhnya. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa per sekolah tingkat SD hanya 196 atau 81,5 persen berarti terjadi ketidakefisien sejumlah 18,5 persen bila 240 dijadikan standar efisiensi sekolah khusus tingkat SD. Bila tingkat SMP menggunakan tipe sekolah C yang memiliki 9 ruang kelas yaitu untuk menampung 360 siswa maka penggunaan ruang kelas tingkat SMP hanya 260 atau hanya mencapai 72 persen. Bila tingkat SM menggunakan asumsi seperti halnya tingkat SMP maka tingkat SM juga belum efisien karena penggunaannya hanya 89 persen. Dengan demikian, dari 4 jenjang pendidikan yang ada maka yang paling efisien adalah SM (320). Selain itu, dapat dikatakan bahwa SM memang sangat kurang sekolahnya sehingga lebih padat siswanya.

R-S/K yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, pada kenyataannya juga sangat bervariasi yaitu dari 16 di TK sampai 30 di tingkat SMP dan SM. R-S/K terpadat terdapat di tingkat SMP dan SM yaitu 30 karena tidak menggunakan sistem ruang kelas sedangkan terjarang terdapat di TK yaitu 16. Dengan demikian, efisiensi penggunaan kelas di TK hanya sebesar 82 persen. Untuk tingkat SD, efisiensi penggunaan kelas hanya 70 persen dan di tingkat SMP dan SM masing-masing 76 persen dan 75 persen. Hal ini menunjukkan makin tinggi jenjang sekolah makin efisien dan makin padat yang juga menunjukkan makin kurangnya ruang kelas yang ada (PDIP, 2004).

R-K/RK pada kenyataannya juga sangat bervariasi dari 0,99 di TK sampai 1,12 di tingkat SD. R-K/RK terbesar terdapat di tingkat SD yaitu 1,12 dan tersedikit terdapat di tingkat SMP yaitu 1,02. Di TK masih terdapat 1 persen ruang kelas yang belum digunakan. R-K/RK di tingkat SD yang terbesar berarti masih terdapat 12 persen ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam menampung anak usia sekolah agar dapat bersekolah di tingkat SD dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di tingkat SD. R-K/RK tingkat SMP yang terbaik karena hanya 2 persen ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali kegiatan belajar. Hal ini akibat banyak ruang kelas dibangun rangka program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun khusus tingkat SMP. R-K/RK di tingkat SM sedikit lebih kecil dari tingkat SD yaitu 10 persen ruang kelas yang ada digunakan lebih dari sekali kegiatan belajar. Hal ini perlu dilakukan penambahan ruang kelas dalam menampung lulusan tingkat SMP agar dapat bersekolah di tingkat SM.

3). Indikator Mutu Pendidikan

Untuk dapat melihat mutu pendidikan maka digunakan beberapa ukuran, yaitu persentase guru layak (%GL) dilihat dari sumber daya manusia pendidikan. Guru layak dimaksud adalah guru yang memiliki ijazah sarjana atau S1. Oleh karena itu, %GL dihitung dari guru yang memiliki ijazah sarjana atau S1 ke atas dibandingkan dengan guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Idealnya, %GL adalah 100 persen, artinya semua guru memiliki ijazah Sarjana dan lebih tinggi. Kondisi makin mendekati 100 persen berarti makin baik.

Untuk melihat mutu pendidikan lainnya dapat dilihat dari prasarana yang

dimiliki, yaitu persentase ruang kelas baik (%RKB) dan persentase kepemilikan perpustakaan (%Perpus) yang menunjang kegiatan belajar mengajar. %RKB dihitung dari jumlah ruang kelas yang baik dibagi dengan ruang kelas seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. %Perpus dihitung dari jumlah perpustakaan yang dimiliki dibagi dengan jumlah sekolah yang ada dan dinyatakan dalam persentase. Seperti halnya %GL maka %RKB dan %perpus idealnya adalah 100 persen, artinya semua sekolah memiliki ruang kelas yang baik dan memiliki perpustakaan. Kondisi makin mendekati 100 berarti makin baik.

Mutu pendidikan juga dapat dilihat dari internal siswa itu sendiri, yaitu angka lulusan (AL), angka mengulang (AU), dan angka putus sekolah (AL). AL dihitung dari jumlah lulusan dibagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dan dinyatakan dalam persentase. Seperti halnya %GL dan prasarana maka idealnya AL adalah 100 persen, berarti semua siswa tingkat tertinggi lulus semua dan makin mendekati 100 persen makin baik.

AU dihitung dari jumlah mengulang dibagi dengan jumlah siswa tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase sedangkan APS dihitung dari jumlah putus sekolah dibagi dengan jumlah siswa tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Berbanding terbalik dengan AL, maka AU dan APS idealnya adalah 0 persen, artinya tidak ada siswa yang mengulang dan putus sekolah.

Tabel 7
Indikator Mutu Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007

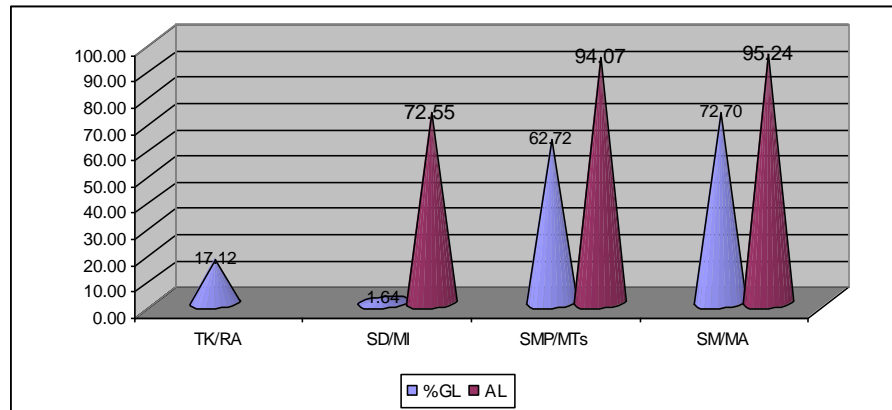
No.	Jenjang	%GL	%RKB	%Perpus	AL (%)	AU (%)	APS (%)
1.	TK	10,15	86.89	-	-	-	-
2.	SD/MI	0.95	44.86	8.71	72.55	4.68	0.74
3.	SMP/MTs	64.34	84.10	52.87	94.07	0.79	1.64
4.	SM/MA	73.17	90.88	47.95	95.24	0.59	1.21

Berdasarkan Tabel 7 untuk %GL yang ada, ternyata %GL tertinggi terdapat di tingkat SM yaitu 73.17 persen dan yang terkecil pada tingkat SD yaitu 0.95 persen. Kondisi di tingkat SD ini sangat kecil akibat adanya peningkatan ijazah guru dari Diploma II menjadi sarjana. Dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka peningkatan mutu guru tingkat SD menjadi layak mengajar harus dijadikan kebijakan yang diprioritaskan oleh pemerintah, khususnya provinsi Sumatera Selatan. Namun, peningkatan mutu guru lainnya juga harus dilaksanakan karena %GL tertinggi hanya sedikit lebih besar dari 70 persen.

Dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka %RKB di tingkat SD tetap yang terkecil, yaitu 44,86 persen sedangkan di tingkat SM yang terbesar, yaitu 90,88 persen. Untuk itu, prioritas rehabilitasi hendaknya dilakukan pada tingkat SD agar program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat tercapai sedangkan TK dan tingkat SMP sudah lebih besar dari 80 persen. Khusus untuk %perpus, AL, AU dan APS maka khusus TK tidak diperoleh datanya sehingga hanya jenjang pendidikan lainnya yang ada. Dalam rangka meningkatkan mutu di tingkat SD, ternyata yang memiliki perpustakaan hanyalah 8,71 persen. Bila mutu tingkat SD akan disamakan dengan tingkat SMP dan SM maka perlu kebijakan khusus dengan memberi prioritas pembangunan perpustakaan pada tingkat SD. Peningkatan mutu yang lebih

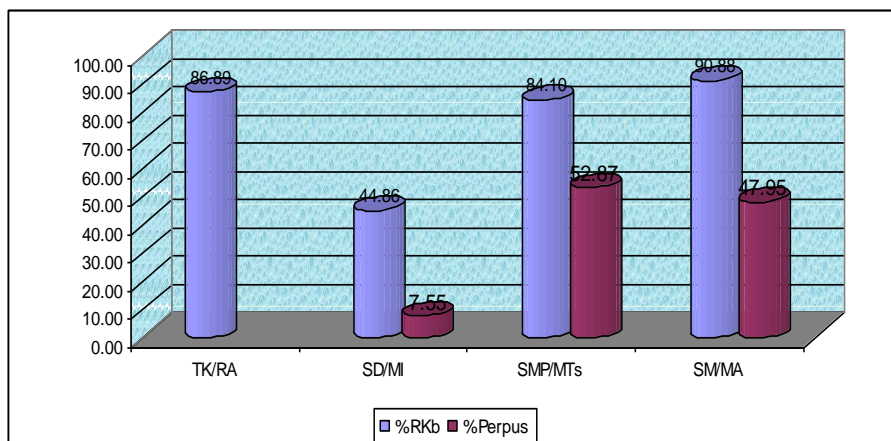
diprioritaskan pada tingkat SM ternyata khusus %perpus juga hanya 47,95 persen berarti masih kurang dari separuh sekolah yang ada. Kondisi di tingkat SMP lebih baik karena lebih dari separuh sekolah telah memiliki perpustakaan dengan %perpus adalah 52,87 persen.

Grafik 9
% GL dan AL menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



AL yang terbesar terjadi di tingkat SM yaitu 95,25 persen dan terkecil pada tingkat SD yaitu 72,55 persen. Dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka AL tingkat SD perlu ditingkatkan karena hanya mencapai 70 persen. Hal yang sama untuk AU tingkat SD yang menduduki nilai terbesar (4,68 persen) jika dibandingkan dengan AU tingkat SMP dan AU tingkat SM, juga perlu diberi perhatian khusus sehingga dapat mendukung dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Besarnya AU tingkat SD akibat masih pentingnya siswa bersekolah untuk belajar membaca dan menulis. Sebaliknya, untuk APS tingkat SMP menduduki nilai terbesar (1,64 persen) dibandingkan dengan APS tingkat SM sebesar 1,21 persen sedangkan APS tingkat SD hanya 0,74 persen. Ada dua hal besarnya APS tingkat SMP, yaitu 1) siswa sudah dapat membaca dan menulis sehingga tidak masalah jika putus tingkat SMP dan 2) program wajib belajar pendidikan 9 tahun tidak akan berhasil bila putus tingkat SMP tidak ditangani dengan baik.

Grafik 10
% Rkb dan % Perpus menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



4. Indikator Efisiensi Internal Pendidikan

Untuk dapat melihat efisiensi internal pendidikan maka digunakan beberapa ukuran, yaitu koefisien efisiensi (KE), angka bertahan (AB), rata-rata lama belajar (RLB) dan rasio masukan-keluaran (RMK). Idealnya untuk KE dan AB adalah 100 persen, berarti tidak ada siswa yang mengulang dan putus sekolah sehingga dari kohort 1.000 siswa akan terjadi 1.000 siswa pula yang lulus. Dengan demikian, bila KE dan AB makin mendekati nilai 100 kondisi sekolah makin efisien. RLB seharusnya untuk tingkat SD adalah 6 tahun karena tingkat SD memiliki 6 tingkat dan bila setiap tahun naik tingkat maka dalam waktu 6 tahun siswa tingkat SD akan lulus. Untuk tingkat SMP dan SM, idealnya RLB adalah 3 tahun karena tingkat SMP dan SM memiliki 3 tingkat. Dengan demikian, RLB makin mendekati 6 atau 3 tahun kondisi sekolah makin efisien. RMK idealnya adalah 1, artinya setiap siswa yang masuk sama dengan siswa yang keluar pada kohort 1.000 siswa. Dengan demikian, RMK makin mendekati nilai 1 kondisi sekolah makin efisien.

Berdasarkan Tabel 8 terdapat 4 jenis indikator efisiensi internal pendidikan. Efisiensi internal ini hanya dapat diberlakukan untuk sekolah yang memiliki sistem tingkat, yaitu tingkat SD, SMP dan SM sehingga untuk TK tidak dapat dilakukan efisiensi internal.

Tabel 8
Indikator Efisiensi Internal Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007

No.	Jenjang	KE (%)	AB (%)	RLB (th)	RMK
1.	SD/MI	91.55	98.18	6.38	0.91
2.	SMP/MTs	95.98	98.66	3.02	0.95
3.	SM/MA	96.21	98.66	3.01	0.95

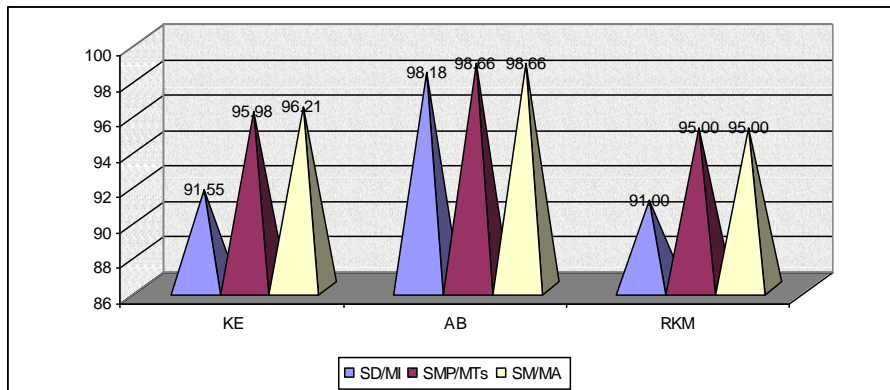
Untuk KE, tingkat SM (96,21 persen) yang paling efisien karena memiliki nilai lebih besar dari tingkat SMP (95,98 persen) dan SD (91,55 persen). KE tingkat SD (91,55 persen) paling rendah karena lokasi tingkat SD sudah sangat tersebar dan berada di daerah terpencil yang kadang-kadang sulit dijangkau sehingga wajar jika nilai KE tingkat SD paling kecil. Walaupun nilai KE SD paling kecil ternyata AB untuk tiga jenjang pendidikan itu hampir sama, yaitu sekitar 98 persen. Hal ini berarti walaupun SD kurang efisien jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, namun dalam siswa bertahan sampai lulus ternyata tidak ada perbedaan antara ketiga jenjang pendidikan tersebut.

RMK tingkat SMP dan SM memiliki nilai paling besar yaitu 0,95 sedangkan tingkat SD yaitu 0,91. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RMK yang kurang dari 1 karena adanya siswa yang putus sekolah sehingga terjadi perbedaan antara yang masuk dengan yang keluar. Oleh karena RMK tingkat SD yang paling kecil berarti kondisinya paling tidak efisien jika dibandingkan dengan jenjang lainnya.

RLB tingkat SD melebihi 6 tahun (6,38 tahun) karena siswa lulus tidak tetap waktu akibat adanya siswa yang mengulang sehingga terdapat beberapa siswa yang lulus dalam waktu 6 tahun, 7 tahun dan 8 tahun. Hal yang sama untuk tingkat SMP, RLB tingkat SMP melebihi 3 tahun (3,02 tahun) karena terdapat beberapa siswa yang lulus tepat waktu 3 tahun dan ada yang lulus setelah 4 tahun. Demikian pula untuk tingkat SM, RLB tingkat SM melebihi 3 tahun

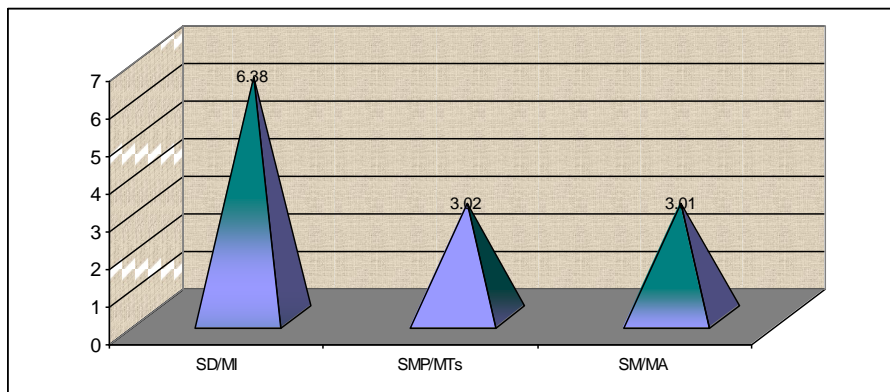
(3,01 tahun) karena terdapat beberapa siswa yang lulus tepat waktu yaitu 3 dan ada yang lulus selama 4 tahun.

Grafik 11
% KE, AB dan RKM menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



Catatan: Dalam grafik RKM digambarkan dalam bentuk persen.

Grafik 12
RLB menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



5) . Analisis Indikator

Ketiga indikator pendidikan tersebut di atas digunakan untuk menilai keberhasilan program pembangunan pendidikan. Indikator pemerataan digunakan untuk menilai pemerataan pendidikan yang dapat dicapai, indikator mutu digunakan untuk menilai mutu pendidikan yang dapat dicapai dan indikator efisiensi digunakan untuk menilai efisiensi internal pendidikan. Gabungan dari ketiga indikator tersebut untuk menilai keberhasilan program pembangunan pendidikan.

Oleh karena indikator pemerataan dalam bentuk persentase dan rasio maka dijadikan satu notasi terlebih dahulu dalam bentuk persentase. Untuk itu, 3 jenis rasio dilakukan konversi menjadi persentase. Hal yang sama untuk indikator efisiensi ada yang dalam bentuk persentase dan tahun maka dijadikan satu notasi terlebih dahulu dalam bentuk persentase. Untuk itu, RKM dalam rasio dan indikator RLB yang dalam tahun juga dilakukan konversi menjadi persentase. Untuk jelasnya, terdapat 5 indikator yang harus mengalami konversi seperti disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Konversi Masing-masing Indikator
Tahun 2007

No.	Indikator	Pemerataan			Efisiensi	
		R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	RLB	R-KM
1.	TK	60	20	1	-	-
2.	SD/MI	240	40	1	6	1
3.	SMP/MTs	360	40	1	3	1
4.	SM/MA	360	40	1	3	1

Analisis indikator akan menghasilkan pendidikan yang merata, pendidikan yang bermutu, pendidikan yang efisien, dan pendidikan yang berhasil. Untuk dapat menghasilkan pendidikan yang merata, bermutu dan efisien maka setiap indikator diberikan bobot yang berbeda karena disesuaikan dengan pengukuran yang terpenting atau paling mempengaruhi. Untuk jelasnya, indikator yang diberikan bobot disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10
Bobot Masing-masing Indikator
Tahun 2007

No.	Jenjang	Indikator Pemerataan					Jml	
		APK	ASK/AM	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK		
1.	TK	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	1,0	
2.	SD/MI	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	1,0	
3.	SMP/MTs	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	1,0	
4.	SM/MA	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	1,0	
		Indikator Mutu						
		%GL	%RKB	%Perp	AL	AU	APS	Jml
1.	TK	0,60	0,40	-	-	-	-	1,00
2.	SD/MI	0,40	0,15	0,15	0,20	0,05	0,05	1,00
3.	SMP/MTs	0,40	0,15	0,15	0,20	0,05	0,05	1,00
4.	SM/MA	0,40	0,15	0,15	0,20	0,05	0,05	1,00
		Indikator Efisiensi					Jml	
		KE	AB	RLB	RKM			
1.	SD/MI	0,50	0,20	0,15	0,15	1,00		
2.	SMP/MTs	0,50	0,20	0,15	0,15	1,00		
3.	SM/MA	0,50	0,20	0,15	0,15	1,00		

Agar dapat ditentukan analisisnya maka diperlukan standar untuk menentukan kondisi baik atau kondisi tidak baik. Khusus untuk indikator pemerataan maka standar yang digunakan untuk APK, ASK/AM adalah makin tinggi makin baik atau mendekati atau sekitar 100 persen. R-S/Sek digunakan standar makin tinggi makin efisien. R-S/K digunakan standar 20 (khusus TK) dan 40 (SD sampai SM) atau makin tinggi makin efisien. R-K/RK digunakan standar 1 atau makin tinggi makin efisien. Khusus untuk indikator mutu maka untuk indikator %GL, %RKB, %Perpus, dan AL adalah indikator mutu yang positif sedangkan indikator AU dan APS adalah indikator mutu yang negatif. Oleh karena itu, indikator mutu yang positif makin mendekati 100 makin bermutu sedangkan indikator mutu yang negatif makin mendekati 0 makin bermutu. Khusus untuk indikator efisiensi maka untuk KE dan AB makin mendekati 100 makin efisien sedangkan RLB makin mendekati 6 (khusus tingkat SD) dan 3 (tingkat SMP dan SM) makin baik sedangkan RKM makin mendekati 1 makin baik.

Nilai untuk pendidikan yang merata adalah penjumlahan 5 jenis indikator pemerataan setelah diberikan bobot. Nilai untuk pendidikan yang bermutu adalah penjumlahan 4 indikator mutu (%GL, %RKB, %Perpus, dan AL) dan dikurangi

indikator AU dan APS karena kedua indikator tersebut dianggap negatif atau mengurangi mutu setelah diberikan bobot. Nilai untuk pendidikan yang efisien adalah penjumlahan dari 4 indikator efisiensi internal setelah diberikan bobot.

Setiap jenis indikator ditentukan memiliki sama derajat atau kepentingannya sehingga dapat dijumlahkan menjadi satu nilai. Dengan demikian, nilai keberhasilan program pendidikan merupakan penjumlahan nilai pemerataan, mutu, dan efisiensi kemudian dibagi 3. Kecuali untuk TK karena tidak dapat dihitung indikator efisiensi maka nilai keberhasilan program pendidikan adalah penjumlahan nilai pemerataan dan mutu kemudian dibagi 2. Nilai maksimal untuk masing-masing indikator dan keberhasilan program pembangunan pendidikan adalah 100, kecuali dalam kasus tertentu dapat terjadi lebih dari 100.

Tabel 11 menunjukkan pendidikan yang lebih merata, lebih berkualitas atau lebih efisien antara keempat jenjang pendidikan yaitu TK, tingkat SD, SMP dan SM. Untuk mengetahui mana yang lebih merata, lebih berkualitas, dan lebih efisien dapat dilihat dari besarnya nilai penjumlahan. Dari empat jenjang pendidikan tersebut, pendidikan yang lebih merata ada pada tingkat SD yang ditunjukkan dengan nilai tertinggi, yaitu 93,80. Hal ini wajar karena tingkat SD memang sudah menjangkau sampai desa terpencil dan yang jauh lokasinya. TK memang paling tidak merata karena belum merupakan kewajiban untuk masuk sekolah sehingga sampai sekarang ini belum digalakkan atau belum ada program pemerintah agar anak masuk TK.

Jenjang pendidikan yang paling bermutu adalah tingkat SM walaupun nilainya hanya 68,86 dan masih di bawah 100. Hal ini juga wajar karena lokasi tingkat SM lebih baik, daerah kota, mudah dijangkau dan prasarana yang mendukung jika dibandingkan dengan tingkat SD dan SMP yang lokasinya ada yang sulit dijangkau. Sesuai dengan lokasi tingkat SD yang jauh dan terkadang sulit dijangkau atau daerah terpencil sehingga wajar jika tingkat SD yang paling tidak bermutu.

Tabel 11
Analisis Indikator Pendidikan (setelah konversi dan bobot)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007

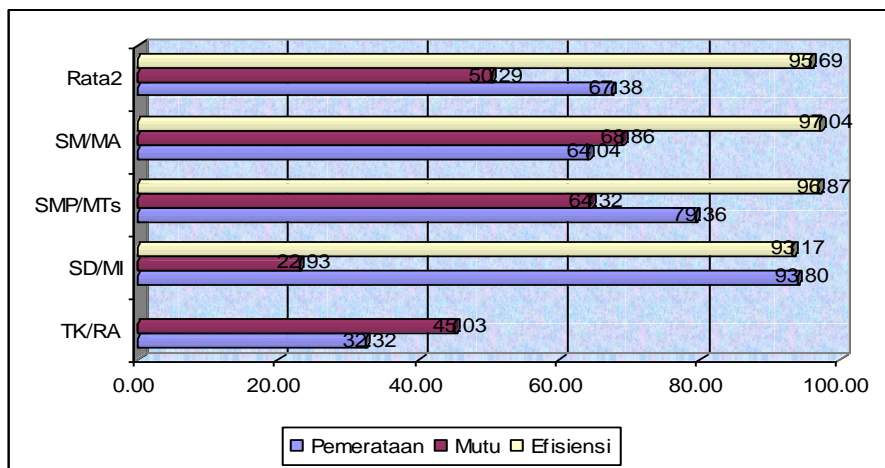
No.	Jenjang	Indikator Pemerataan						Jml
		APK	ASK/ AM	R- S/Sek	R-S/K	R- K/RK		
1.	TK	4.87	0.98	8.15	8.21	10.10	32.32	
2.	SD/MI	56.25	13.48	8.15	6.95	8.96	93.80	
3.	SMP/MTs	37.37	17.02	7.22	7.57	10.18	79.36	
4.	SM/MA	24.73	13.83	8.89	7.54	9.06	64.04	
		Indikator Mutu						
		%GL	%Rkb	%Perp	AL	AU	APS	Jml
1.	TK	10.27	34.76	-	-	-	-	45.03
2.	SD/MI	0.65	6.73	1.31	14.51	0.23	0.04	22.93
3.	SMP/MTs	25.09	12.61	7.93	18.81	0.04	0.08	64.32
4.	SM/MA	29.08	13.63	7.19	19.05	0.03	0.06	68.86
		Indikator Efisiensi						
		KE	AB	RLB	RKM	Jml		
1.	SD/MI	45.78	19.64	14.11	13.65	93.17		
2.	SMP/MTs	47.99	19.73	14.90	14.25	96.87		
3.	SM/MA	48.11	19.73	14.95	14.25	97.04		

Kondisi yang paling baik adalah pendidikan yang efisien, ternyata ketiga jenjang pendidikan itu hampir semuanya mendekati nilai 100 berarti mendekati efisien, sedangkan tingkat SD yang terendah yaitu 93,17 sedangkan tingkat SMP dan SM masing-masing 96,87 dan 97,04. Dengan demikian, dalam menggunakan rumusan di atas maka yang paling efisien adalah tingkat SM dengan nilai terbesar.

Tabel 12
 Nilai Pencapaian Keberhasilan Program
 Provinsi Sumatera Selatan
 Tahun 2007

No.	Indikator	Pendidikan			
		Merata	Bermutu	Efisien	Berhasil
1.	TK	32.32	45.03	-	38.67
2.	SD/MI	93.80	22.93	93.17	69.96
3.	SMP/MTs	79.36	64.32	96.87	80.19
4.	SM/MA	64.04	68.86	97.04	76.65
	Rata-rata	67.38	50.29	95.69	66.37

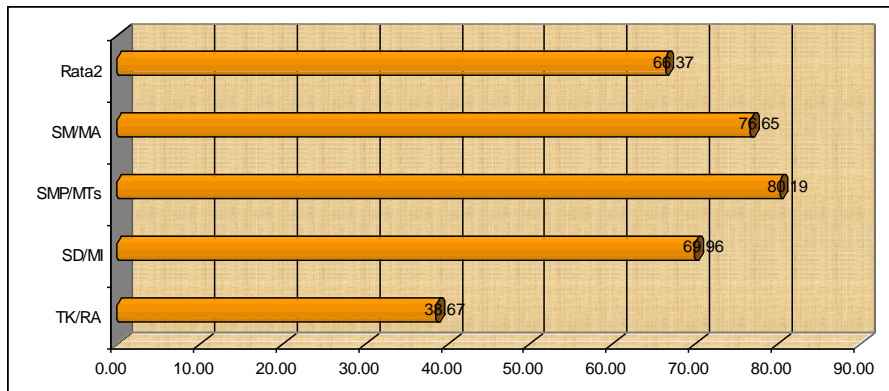
Grafik 13
 Nilai Pencapaian Masing-masing Indikator Pendidikan
 Tahun 2007



Dengan melihat pencapaian atau keberhasilan sejumlah indikator untuk setiap jenjang pendidikan yang terdapat pada Tabel 12 maka dapat dikatakan bahwa tingkat SMP mempunyai kinerja atau keberhasilan yang paling unggul (80,19) jika dibandingkan dengan tingkat SM (76,65) dan SD (69,96). Namun, bila dibandingkan dengan TK maka terjadi kesenjangan yang cukup besar karena TK hanya 38,67 hampir separuh dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja tingkat SMP yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SM, SD dan TK. Kinerja tingkat SMP paling unggul karena termasuk dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang sedang digalakkan dan akan dituntaskan pada tahun 2008.

Masih pada Tabel 12, bila masing-masing indikator dirata-rata untuk setiap strategi pembangunan pendidikan maka rata-rata pendidikan yang efisien menduduki porsi paling tinggi, yaitu 95,69 sedangkan pendidikan yang bermutu paling rendah, yaitu 50,29. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agar pendidikan berhasil maka perlu diadakan perubahan atau perbaikan dalam pemerataan karena hanya mencapai 67,38 dan peningkatan mutu yang hanya mencapai 50,29 sedangkan efisiensi pendidikan agar tetap dipertahankan.

Grafik 14
Nilai Pencapaian Keberhasilan Program
Tahun 2007



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dinas Pendidikan

Untuk dapat menjalankan amanat terhadap pembangunan pendidikan, maka diperlukan kejelasan program dan kegiatan sehingga program dan kegiatan yang telah disusun memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang akan datang. Maka dalam Renstra 2008-2013 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan untuk meningkatkan kemampuan SDM sehingga memiliki daya saing yang seimbang dengan bangsa-bangsa lain.

Mencermati kondisi sebagaimana diutarakan diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan visi dan misi pendidikan nasional untuk jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam jangka menengah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selaras dengan tujuan pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan visi yang ingin dicapai dalam pembangunan pendidikan adalah :

“Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang Bertaqwa, cerdas, dan berbudaya”

4.2. Misi Dinas Pendidikan

Guna mewujudkan, visi tersebut diatas, maka misi pembangunan pendidikan yang ingin diwujudkan adalah :

- 1). Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Sumatera Selatan.
- 2). Melaksanakan komitmen sekolah gratis
- 3). Mengembangkan potensi anak secara utuh sejak usia dini dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar di Sumatera Selatan
- 4). Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian anak.
- 5). Meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis ICT
- 6). Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai budaya bangsa.
- 7). Memberdayakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung selama ini, selain telah menghasilkan berbagai keberhasilann yang telah dicapai, juga masih menyisakan beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Dengan melihat kondisi yang ada, berbagai permasalahan pokok yang menuntut perhatian dalam

pembangunan ke depan diantaranya adalah : **(1) Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan**, keterbatasan lapangan kerja dan kualitas SDM yang masih rendah menjadi penyebab utama tingginya pengangguran dan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, keterampilan/keahlian, dan kompetensi tenaga kerja yang masih rendah; **(2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana**, Pembangunan wilayah pusat pertumbuhan bertujuan untuk mempercepat keseimbangan pembangunan antar wilayah, masih besarnya ketimpangan pembangunan, membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; **(3) Belum optimalnya pemanfaatan Sumberdaya Alam**, kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan merupakan potensi yang besar untuk dapat melaksanakan pembangunan wilayahnya, namun belum dikelola secara efektif dan efisien untuk memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan;

Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan jangka menengah adalah:

- 1). Meningkatkan Iman, Takwa dan Akhlak Mulia
- 2). Meningkatkan penguasaan ilmu dan teknologi
- 3). Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan bagi semua warga masyarakat.
- 4). Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun
- 5). Menurunkan jumlah penduduk buta aksara
- 6). Meningkatkan daya saing dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, trampil, ahli dan profesional.
- 7). Meningkatkan kualitas pendidikan dengan sekolah bertaraf internasional, serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- 8). Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- 9). Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan
- 10). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan

Sesuai dengan tujuan dari organisasi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan maka sasarannya melingkupi sebagai berikut :

- 1). Meningkatnya APK semua jenis dan jenjang pendidikan
- 2). Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sampai dengan tahun 2009.
- 3). Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peserta didik
- 4). Terlaksananya sekolah gratis
- 5). Penerapan manajemen pendidikan berbasis ICT
- 6). Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan.
- 7). Meningkatnya kuantitas tenaga guru yang profesional.
- 8). Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pendidikan
- 9). Meningkatnya kesejahteraan guru.
- 10). Meningkatnya kualitas lulusan SMK.

4.4. Strategi

Pokok-pokok kebijakan strategis, program, sasaran serta strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra 2008-2013 disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran lima tahun kedepan lebih realistis dan konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis. Analisis lingkungan strategis dikaji dalam Bab ini dapat dilihat baik dari tantangan internal maupun eksternal.

Kondisi eksternal dan internal yang dihadapi di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Peluang

- 1). Otonomi daerah memberikan keleluasaan untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan potensi daerah.
- 2). Belum tergalinya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan.
- 3). Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pelaksana pemerintah di bidang pendidikan, dengan rincian tugas yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor; 232 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengatur dan melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pelayanan pendidikan. dan diubah dengan perda nomor 8 tahun 2008

Ancaman

- 1). Globalisasi tidak diimbangi dengan kesiapan SDM
- 2). Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia
- 3). Otonomi daerah yang cenderung mengabaikan kerjasama antar daerah menyebabkan sulit koordinasi
- 4). Kebijakan pendidikan antar kabupaten/kota cenderung berubah-ubah

Kekuatan dan potensi

- 1). Memiliki sumberdaya manusia yang cukup dan berpengalaman dalam bidang pendidikan yang siap didayagunakan.
- 2). Respon positif legislatif terhadap tuntutan perkembangan global dan kebijakan desentralisasi
- 3). Adanya amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang alokasi anggaran pendidikan 20%.
- 4). Tersedianya anggaran baik melalui APBD maupun APBN

Kelemahan

- 1). Kondisi geografis Sumatera Selatan yang sebagian besar perairan
- 2). Kurangnya akses layanan pendidikan
- 3). Sebagian besar tenaga kependidikan belum memenuhi kualifikasi
- 4). Kapasitas daerah dalam pengelolaan manajemen pendidikan masih rendah
- 5). Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan
- 6). Cepatnya perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diiringi oleh kemampuan karyawan yang mengakibatkan keterlambatan dalam teknologi informasi

4.5. Kebijakan

4.5.1. Pemerataan dan Perluasan Akses

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Sumatera Selatan untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat IPM hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan meningkatkan APK PAUD hingga mencapai 90% mempertahankan APM-SD pada tingkat di atas 100 %, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 100 % atau APM 90% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 2%.

Perintisan wajib belajar 12 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan dengan melaksanakan komitmen sekolah gratis. Di samping itu, akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah untuk pelaksanaan rintisan wajib belajar 12 tahun. Dengan bertambahnya permintaan pendidikan menengah, Pemerintah Daerah juga melakukan perluasan pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat menikmati pendidikan SMA yang bersifat reguler, melalui SMA Terbuka dan Paket C, sehingga pada gilirannya mendorong peningkatan APM-SMA. Oleh karena SMA cenderung semakin meluas jauh di atas SMK, maka Pemerintah Daerah Sumatera Selatan lebih mempercepat pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1). Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar.

- 2). Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan baik pada sekolah umum maupun madrasah yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat, yang besarnya dihitung berdasarkan *unit cost* per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada semua jenjang pendidikan. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian subsidi biaya personal terutama bagi siswanya berasal dari keluarga miskin pada jenjang dikdas melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut. Secara bertahap BOS akan dikembangkan menjadi dasar untuk penentuan satuan biaya pendidikan berdasarkan formula (*formula-based funding*) yang memperhitungkan siswa miskin maupun kaya serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.
- 3). Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/ inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk memperluas akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui optimalisasi daya tampung dan pengembangan SMP Terbuka model maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang inovatif.
- 5). Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses SMA, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. Di sisi lain dikembangkan SM terpadu, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.
- 6). Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.
- 7). Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat ICT lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif selain menggunakan modul atau tutorial, terutama bagi daerah terpencil dan mengalami hambatan dalam transportasi, serta jarang penduduk.

Kebijakan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut:

- 1). **Pendanaan BOS dan Iuran Komite Sekolah;** adalah kebijakan yang menempati urutan prioritas tertinggi dalam lima tahun ke depan. Hal ini sudah menjadi komitmen nasional seperti yang tertera pada Undang Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi

upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan kebijakan subsidi BOS tersebut, pemerintah akan mewujudkan “pendidikan gratis”, yang diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap.

- 2). **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;** merupakan kebijakan strategis berikutnya, yang akan dilakukan untuk mendukung. Penyediaan sarana/prasarana SD/MI/ sederajat mencakup penambahan sarana untuk pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana/prasarana yang rusak. Untuk SMP/MTs/ sederajat, kegiatan ini diarahkan untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran, yang diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan mutu dikdas.
- 3). **Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan;** juga merupakan kebijakan strategis untuk mendukung program pendidikan dasar 9 tahun. Rekrutmen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan kualifikasi guru profesional di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, pemerataan penyebaran secara geografis, keahlian, dan kesetaraan gender. Pemerataan secara geografis mempertimbangkan pengaturan mekanisme penempatan dan redistribusi guru, sistem insentif guru di daerah terpencil, pengangkatan guru tidak tetap secara selektif, serta tenaga pendidikan lainnya seperti pamong belajar pada jalur non-formal.
- 4). **Perluasan Akses SLB dan Sekolah Inklusif;** merupakan kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sehingga memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan belajar karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi bakat istimewa atau kecerdasan luar biasa.
- 5). **Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia pendidikan dasar di daerah terpencil/kepulauan; daerah yang berpenduduk jarang dan terpencar; daerah bencana; daerah konflik; serta daerah terisolasi dan anak jalanan;** adalah kebijakan untuk penduduk yang kesulitan akses karena faktor sosial ekonomi, geografis, sarana transportasi dan komunikasi. Kelompok penduduk yang kurang beruntung karena terisolasi atau hambatan lainnya, mendapat pelayanan khusus, antara lain melalui SD/MI Kecil/Paket A, SMP/MTs kecil/Paket B, SMP Terbuka dan SD-SMP “Satu Atap”, Guru Kunjung dan Kelas Layanan Khusus di SD (KLK), termasuk layanan dengan memanfaatkan ICT, seperti radio, televisi, komputer dan internet.
- 6). **Perluasan Akses PAUD;** merupakan kebijakan untuk mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia 0-6 tahun baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal. Kegiatan pemerintah lebih diarahkan untuk memberikan dukungan atau pemberdayaan bagi terselenggaranya pelayanan PAUD yang bermutu oleh masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air. Subsidi *blockgrants* atau imbal swadaya akan diberikan untuk pengembangan PAUD, PAUD Model, dan berbagai bentuk integrasi PAUD ke dalam berbagai pelayanan anak usia dini lainnya.

- 7). **Pendidikan Kesetaraan;** merupakan kebijakan untuk mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan bagi anak-anak putus SD melalui Paket A, putus SMP melalui Paket B, dan putus SMA melalui Paket C agar mereka memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang setara dengan lulusan SD, SMP dan SMA formal
- 8). **Pendidikan Kecakapan Hidup;** merupakan kebijakan strategis bagi peserta didik yang orang tuanya miskin dan orang dewasa miskin dan/atau pengangguran. Pendidikan ini akan memberikan kompetensi yang dapat dijadikan modal untuk usaha mandiri atau bekerja, mengingat masih besarnya jumlah mereka, maka kegiatan strategis ini menjadi sangat penting peranannya bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- 9). **Perluasan Akses SMA/SMK dan SM Terpadu;** arah kebijakan ini lebih untuk memperluas SMK untuk mencapai komposisi jumlah SMA dan SMK yang seimbang pada tahun 2009. Perluasan SMA lebih ditekankan pada partisipasi swasta. Kebijakan ini ditempuh setelah melihat kenyataan bahwa bagian terbesar (65%) penganggur terdidik adalah lulusan pendidikan menengah
- 10). **Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perluasan Akses SMA/SM/SMK/SM terpadu, dan SLB;** kegiatan ini termasuk dalam prioritas kebijakan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan : *pertama*, bahwa kemampuan keuangan pemerintah masih terbatas untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya sementara itu ada potensi yang cukup besar pada masyarakat; *kedua*, kecenderungan arah pembangunan pendidikan yang ingin lebih banyak melibatkan partisipasi swasta di segala aspek penyelenggaraan, termasuk investasi, pengelolaan, dan pengawasan; *ketiga*, sesuai dengan amanat UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah daerah akan lebih banyak memainkan perannya sebagai fasilitator pelayanan publik yang bertugas membuat kebijakan-kebijakan strategis, yang antara lain dilakukan melalui pengendalian dan penjaminan mutu, pengembangan standar-standar, akreditasi, dan sertifikasi dalam rangka desentralisasi pendidikan. Peran yang demikian ingin mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan yang mandiri (otonom), baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat (swasta). Dalam pemberian subsidi biaya operasi penyelenggaraan pendidikan, pemerintah tidak lagi membedakan antara kepemilikan negara dan masyarakat/swasta.

4.5.2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-

akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari PAUD, Dikdas, Pendidikan Menengah (Dikmen).

Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran pada pendidikan formal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spritual peserta didik.

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan dilakukan pemerintah daerah Sumatera Selatan, dan satuan pendidikan secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut telah didelegasikan oleh pusat kepada Gubernur. Manajemen mutu tersebut akan dilaksanakan melalui kebijakan strategis sebagai berikut.

- 1). Mengembangkan dan menetapkan standar nasional pendidikan sesuai dengan PP SNP No. 19/2005, sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumberdaya pendidikan, akreditasi satuan dan program pendidikan, serta upaya penjaminan mutu pendidikan.
- 2). Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekoah oleh sekolah dan ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ujian nasional mengukur ketercapaian kompetensi siswa/ peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional (*benchmark*). Hasil ujian nasional tidak merupakan satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan siswa pada setiap satuan pendidikan tetapi terutama sebagai sarana untuk melakukan pemetaan dan analisis mutu pendidikan yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan provinsi.

- 3). Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) melalui suatu proses analisis yang sistematis terhadap hasil ujian nasional dan hasil evaluasi lainnya yang dimaksudkan untuk menentukan faktor penguangkit dalam upaya peningkatan mutu, baik antar-satuan pendidikan, antar kabupaten/kota, antar-provinsi, atau melalui pengelompokan lainnya. Analisis dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah provinsi yang secara teknis dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada masing-masing wilayah. Berdasarkan analisis itu, diberikan intervensi terhadap satuan dan program (studi) pendidikan di antaranya melalui: pendidikan dan pelatihan terutama pengembangan proses pembelajaran efektif, pemberian bantuan teknis, pengadaan dan pemanfaatan sumberdaya pendidikan, serta pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Di samping itu untuk mempercepat tercapainya pemerataan mutu pendidikan dilakukan pemberian subsidi yang diarahkan pada satuan pendidikan yang belum mencapai standar nasional.
- 4). Melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan untuk menentukan status akreditasinya masing-masing. Penilaian dilakukan setiap lima tahun dengan mengacu pada SNP. Akreditasi juga dapat menggunakan rata-rata hasil ujian nasional dan/atau ujian sekolah sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan status akreditasi tersebut. Hasil akreditasi dijadikan sebagai landasan untuk melakukan program pengembangan kapasitas dan peningkatan mutu setiap satuan atau program pendidikan. Pelaksanaan akreditasi ini dilakukan secara independen oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).

Kebijakan untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut:

- 1). **Pengawasan dan Penjaminan Mutu secara Terprogram dengan Mengacu pada SNP;** untuk mewujudkan sistem pengawasan dan penjaminan mutu secara berkelanjutan. Karena itu perlu dikembangkan dan dikelola mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Kegiatan utamanya antara lain: pembentukan BAN-SM,; menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan; menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan; evaluasi; dan ujian nasional untuk mengukur ketercapaian standar pendidikan yang telah ditetapkan; serta pengembangan kapasitas pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta satuan pendidikan.
- 2). **Pengembangan Guru sebagai Profesi;** merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Sesuai dengan usaha dan prestasinya, guru akan memperoleh imbal jasa, insentif, dan penghargaan, atau sebaliknya, disinsentif atas tidak terpenuhinya standar profesi oleh seorang guru. Pendidikan profesi guru dan sistem sertifikasi profesi pendidik akan dikembangkan baik untuk calon guru (*pre service*) maupun untuk guru yang sudah bekerja (*in service*). Standar profesi guru akan dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerja guru yang dilakukan secara

berkelanjutan atas dasar kinerjanya baik pada tingkat kelas maupun satuan pendidikan.

- 3). **Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;** peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan pemetaan profil kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan SNP, analisis kesenjangan kompetensi, serta penyusunan program dan strategi peningkatan kompetensi menuju pada tercapainya SNP.
- 4). **Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana;** merupakan kegiatan strategis yang ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak terutama pada dikdas untuk meningkatkan keamanan/keselamatan, kenyamanan, dan kualitas proses pembelajaran. Untuk mencapai mutu pendidikan sesuai dengan SNP dikembangkan sarana dan prasarana pendidikan terutama buku pelajaran dan buku penunjang laboratorium, perpustakaan, ruang praktek, sarana olah raga, sarana ibadah, dan sarana pendidikan lainnya.
- 5). **Perluasan Pendidikan Kecakapan Hidup;** merupakan kegiatan strategis dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang mencakup pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam rangka pengembangan kompetensi, kepribadian, kewarganegaraan, intelektual, estetika, dan kinestik pada berbagai satuan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Tujuannya agar keluaran pendidikan memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang terus berkembang secara mandiri.
- 6). **Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan;** kegiatan ini berupa pengembangan sistem, metode, dan materi pembelajaran dengan menggunakan ICT. Kegiatan ini juga akan mengembangkan sistem jaringan informasi sekolah, infrastruktur dan SDM untuk mendukung implementasinya, baik untuk kepentingan manajemen pendidikan maupun proses pembelajaran. Dengan menggunakan ICT dalam pendidikan siswa pada sekolah reguler, warga belajar pada pendidikan nonformal dan siswa yang memerlukan layanan pendidikan khusus, secara adil dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan.

4.5.3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Tujuan jangka panjang Disdik Provinsi Sumatera Selatan adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orang tua maupun *stakeholder* lain di setiap tingkat pemerintahan.

Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (*sector-wide approach*) yang bercirikan: (a) program kerja

disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran *stakeholder* yang lebih luas.

Pemerintah melaksanakan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik dan terencana dengan menggunakan pendekatan keseluruhan sektor tersebut di atas. Strategi pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan secara *endogeneous* atau perubahan yang didorong secara internal. Perubahan yang didorong secara internal akan lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan, menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan, serta komitmen bersama.

Kebijakan *tata kelola* dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.

Pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur. Untuk itu, segenap aparatur yang ada di Diknas Sumatera Selatan perlu meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil di dalam suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah *mindset* atas perilaku dan sikap seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui Sistem Pengendalian Internal (SPI), pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP, dan Inspektorat Provinsi terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang.

Sejalan dengan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan berdasarkan otonomi dan desentralisasi, pemerintah pusat mengkoordinasikan manajemen mutu pendidikan, sementara pemerintah daerah berperan dalam manajemen sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan. Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah serta penataan *tata kelola* pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat

satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu.

Pengembangan kapasitas diarahkan pada peningkatan kemampuan Kabupaten/kota secara sistematis untuk memberikan pelayanan pendidikan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan SNP. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan pada kabupaten/kota dikembangkan dan diremajakan indikator-indikator kinerja pengelolaan layanan pendidikan, baik pada jalur formal maupun non-formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam jangka menengah diperkuat kapasitas pengelolaan layanan pendidikan terhadap kabupaten/kota sehingga dapat menambah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas pelayanan sesuai dengan SNP.

Pengembangan kapasitas bagi setiap tingkat pemerintahan daerah Sumatera Selatan harus diarahkan pada peningkatan efisiensi pendidikan sebagai berikut.

- 1). Pada tingkat provinsi, pengembangan kapasitas harus lebih diarahkan pada peningkatan institusi pengelola dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi, yaitu kemampuan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengelola pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang pusat, misalnya pengendalian mutu, penjaminan mutu, evaluasi dan monitoring program, serta akreditasi. Kapasitas provinsi juga perlu ditingkatkan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antarkabupaten/kota.
- 2). Pada tingkat kabupaten/kota, perlu penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kabupaten/kota berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam upaya mencapai kemandirian.
- 3). Pada satuan pendidikan, penguatan kapasitas tercermin dari kemampuan satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk mencapai standar nasional pendidikan. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan agar mendorong kegiatan belajar peserta didik secara optimal.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas satuan pendidikan, sistem monitoring dan evaluasi ditata melalui mekanisme pelaporan kinerja satuan pendidikan. Peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui pemberian bantuan bagi kabupaten/kota untuk melakukan monitoring kinerja pada satuan pendidikan. Melalui suatu tata kelola, sistem audit kinerja akan lebih difokuskan pada pelaksanaan *block grants* yang tepat sasaran. *Block grants* dilengkapi dengan dana pendamping dari penerima sehingga dapat menimbulkan rasa kepemilikan dari suatu program pembangunan.

Dengan strategi-strategi tersebut di atas akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara sehat melalui peningkatan fungsi kontrol dari *stakeholder* pendidikan

dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan pendidikan. Diharapkan dalam lima tahun yang akan datang (tahun 2013) informasi tentang kinerja satuan pendidikan dapat diakses oleh keluarga dan masyarakat. SMK dan pendidikan tinggi vokasi didorong untuk menyediakan layanan informasi tentang penempatan kerja lulusannya sebagai bagian dari akuntabilitas satuan pendidikan.

Penerapan ICT akan dimanfaatkan secara optimal untuk membantu merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel. Model penerapannya dapat diwujudkan melalui media *on-line* yang memuat informasi dan laporan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kepada publik atau *stakeholder* pendidikan lainnya. Dengan media tersebut, partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan, kritik, atau informasi lainnya dapat diakomodasi secara lebih mudah dan terbuka kepada pembuat kebijakan.

Kebijakan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut.

- 1). **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Perencanaan dan Penganggaran;** kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan berbasis kinerja, melalui: (a) perbaikan kapasitas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program-program Renstra Pendidikan 2008-2013, (b) pengembangan strategi manajemen kurikulum, bahan ajar dan manajemen pembelajaran untuk identifikasi, advokasi, dan penyebarluasan praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan pendidikan tingkat kabupaten/kota dan/atau satuan pendidikan, dan (c) mengembangkan sistem kerja sama untuk perencanaan, pengelolaan, monitoring kinerja sistem pendidikan secara menyeluruh. Program pengembangan kapasitas pusat/provinsi bertujuan untuk memberikan bantuan teknis, monitoring kinerja, dan manajemen strategis kepada kabupaten/kota dan satuan pendidikan.
- 2). **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Managerial Aparat;** untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan perlu dilakukan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pengembangan kapasitas para pengelola pendidikan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengembangan kapasitas pengelola pendidikan pada tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan pengelola pelayanan pada tingkat satuan pendidikan. Pengembangan kapasitas pengelola dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan pengelola dalam pelayanan pendidikan yang efektif, inovatif, efisien, dan akuntabel.
- 3). **Peningkatan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan;** beberapa kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kedisiplinan, kinerja, dan akuntabilitas seluruh aparat pengelola pendidikan, melalui: peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
- 4). **Penataan Regulasi Pengelolaan Pendidikan;** menjawab berbagai permasalahan dan tantangan masa depan pendidikan, instrumen peraturan

perundang-undangan, kebijakan, pedoman, standar, dan aturan pelaksanaan teknis lainnya menjadi prioritas yang tidak kalah penting untuk terus disempurnakan dan dikembangkan.

- 5). **Peningkatan Pencitraan Publik;** di samping terus melakukan dan memantau program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan nasional, Depdiknas juga perlu melakukan sosialisasi kepada publik tentang apa yang direncanakan, yang telah dilakukan, dan bagaimana melakukan perbaikan. Selain untuk melakukan sosialisasi, paparan kepada publik juga dapat menjadi sarana peningkatan citra Diknas Sumatera Selatan dan sisdiknas itu sendiri. Melalui paparan tersebut, diharapkan ada masukan dari seluruh masyarakat, khususnya pemerhati pendidikan nasional.
- 6). **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Pendidikan;** pada era desentralisasi pendidikan ada gejala penurunan kualitas dan kompetensi pengelola pendidikan, baik yang berada di provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Untuk ini, berbagai bentuk dan model pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut akan dikembangkan.
- 7). **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemeriksaan oleh ITJEN, BPKP, dan BPK dan ITJEN Provinsi;** kegiatan intensifikasi pengawasan dilakukan dengan meninggalkan konsep pengawasan internal tradisional, dimana akuntansi dipandang sebagai perhatian utama pengawasan internal, menuju konsep pengawasan modern dimana pengawasan merupakan bagian dari manajemen yang menuntut peran yang lebih daripada sebagai kontrol tetapi juga sebagai supervisor. Penggunaan dan pengembangan teknik pengawasan juga menjadi prioritas dalam program pengawasan Inspektorat Jenderal. Pengawasan kinerja menjadi tekanan pengawasan sesuai dengan basis pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan kinerja. Kegiatan ekstensifikasi dilakukan melalui peningkatan jumlah aparat pengawasan (auditor pendidikan) perluasan jumlah sasaran pengawasan, dan lama hari pengawasan.
- 8). **Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan-temuan Pemeriksaan ITJEN, BPKP, dan BPK dan ITJEN Provinsi ;** pengawasan tidak akan ada maknanya apabila pemeriksaan tidak ditindaklanjuti. Untuk itu diperlukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan oleh obyek pemeriksaan, untuk mengetahui apakah tindak lanjut yang dilaksanakan telah sesuai dengan rekomendasi pemeriksa. Selanjutnya ditentukan pencapaian jumlah dan kualitas atas tindak lanjut/penyelesaian temuan tersebut.
- 9) **Pengembangan Aplikasi SIM secara Terintegrasi (Keuangan, Aset, Kepegawaian, dan Data lainnya);** sangat disadari bahwa data-data (keuangan, program, aset, SDM, dan sebagainya) yang ada saat ini seolah-olah saling terpisah. Padahal seyogyanya data itu merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Membangun sistem yang dapat mengintegrasikan semua data yang dibutuhkan dalam mengelola departemen menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Selain untuk memperkecil terjadinya kesalahan manusia (*human error*), sistem tersebut dapat mengurangi pengulangan kegiatan pencatatan.

Berdasarkan analisis situasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program sampai dengan tahun 2007 telah diidentifikasi sejumlah permasalahan, tantangan dan peluang untuk membangun pendidikan yang lebih demokratis dan bermutu dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, perlu dirumuskan kebijakan strategis dan kebijakan operasional yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan program dan sasaran pembangunan pendidikan nasional, sehingga pendekatan yang dilakukan bisa lebih efektif.

Renstra 2008-2013 ini disusun dengan menggunakan pendekatan sektor secara keseluruhan (*sector-wide approach*) dalam rangka mewujudkan integrasi dan harmonisasi antar program. Keterkaitan antar program pembangunan pendidikan sangat diperlukan agar dicapai efisiensi dan produktivitas sektor secara optimal.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Pendirian TK Negeri di setiap Kecamatan minimal 2 lembaga
2. Pemberdayaan Organisasi Sosial, Organisasi Wanita untuk merintis pendirian lembaga PAUD
3. Sosialisasi PAUD
4. Membantu sebagian Alat APE, Insentif/Transport tutor dan lembaga PAUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

1. SD
 - a. Membangun USB Kecil dan menyelenggarakan SD Pamong di daerah yang penduduknya terpencar.
 - b. Rehabilitasi Gedung SD
 - c. Bantuan Operasional Sekolah BOS
2. SMP
 - d. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP
 - e. Pembangunan Rang Kelas Baru
 - f. Pengembangan SD-SMP Satu Atap
 - g. Pembangunan Ruang Lainnya
 - h. Rehabilitasi SMP
 - i. Pembukaan Kelas Jauh
 - j. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - k. Penambahan Sarana dan Prasarana lainnya

Program Pendidikan Menengah

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA minimal setiap Kecamatan 1 SMAN
2. Pembangunan USB SMK.
3. Pembangunan Ruang Kelas Baru.
4. Pengembangan SMP-SMA Satu Atap di Daerah terpencar dan Terpencil
5. Rehabilitasi Gedung SMA/SMK
6. Pembangunan Ruang Penunjang lainnya

Program Pendidikan Luar Sekolah

1. Menambah pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) utamanya pada desa-desa dalam kecamatan yang memiliki kantong-kantong Buta Aksara yang cukup tinggi.
2. Memberdayakan guru untuk menjadi Tutor di PKBM
3. Bekerjasama dengan Organisasi Wanita (PKK, BKOW, Aisyah) dalam upaya pendidikan lembaga BKBM dan pembelajaran bagi warga Buta Aksara
4. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam upaya pembelajaran warga buta aksara melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata

5. Membantu pengadaan sarana belajar di PKBM
6. Memberikan Insentif bagi para tutor
7. Pelatihan bagi tenaga tutor
8. Meningkatkan jumlah sasaran warga buta aksara yang akan dibelajarkan dalam .

Indikator Kinerja

Bidang Pendidikan mempunyai program pembangunan yang sangat beragam, maka indikator kinerja yang diukur dapat bersifat fisik (misalnya pembangunan prasarana dan sarana fisik, angka partisipasi siswa, angka mengulang, kelas, angka putus sekolah maupun non fisik misalnya peningkatan mutu nilai UN serta kecerdasan perilaku peserta didik. Berdasarkan sifat dari masing-masing jenis indikator kinerja maka diperlukan cara dan alat ukur yang berbedasesuai dengan sifat dan bentuk indikator yang akan diukur.

Indikator yang akan diukur dalam pemantauan dan evaluasi meliputi tiga tema pendidikan yang diklasifikasikan dalam 5 aspek yaitu perluasan dan pemerataan , mutu dan daya saing, relevansi dan governance dan pencitraan publik. Dari lima aspek tersebut akan menjadi indikator kunci untuk mengukur keberhasilan target Renstra.

No	Sasaran	Indikator Kunci	Kondisi dan Target						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Perluasan Pendidikan	- APK PAUD/TK	32,45%	35,00%	45,00%	56,24%	64,40%	86,74%	85,00%
		- APM SD/Paket A/MI/SDLB	94,22%	94,70%	95,60%	96,10%	96,70%	96,90%	97,00%
		- APK SMP/Paket B/MTs	91,58%	93,16%	98,20%	100%	100%	100%	100%
		- APK SMA/SMK/Paket C/MA							
		- Prosentase Buta Aksara	3,16%	3,10%	3%	2,72%	2,48%	2,20%	2%
2	Pemerataan Pendidikan	- Disparitas APK PAUD antara Kab/Kota	14,10%	12%	11,02%	10,00%	9,00%	8,00%	6,00%
		- Disparitas APK SD/MI antara Kab/Kota	2,40%	2,30%	2,20%	2,10%	2,00%	1,80%	1,60%
		- Disparitas APK SMP/MTs antara Kab/Kota	23%	20%	18%	16%	14%	12%	10%
		- Disparitas APK SMA/MA/SMK antara Kab/Kota							
3	Mutu dan Daya Saing	- Rata-rata nilai UASBN SD/MI		5,0	5,25	5,5	5,75	6,0	6,25
		- Rata-rata nilai UN SMP/MTs	6,5	6,72	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0
		- Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK	6,5	6,6	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0
		- Kualifikasi Guru yang memenuhi minimum S1/DIV	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
		- Pendidik yang memperoleh sertifikasi	5%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
		- Kab/kota minimal memiliki 1 SMP SNBI	3	6	8	10	12	14	15
		- Kab/kota minimal memiliki 1 SMA SNBI	3	6	8	10	12	14	15
		- Sekolah terakses ICT	20%	30%	40%	50%	55%	60%	70%
4	Relevansi Pendidikan	- Rasio jumlah murid SMK: SMA	30:70	35:65	40:60	45:55	50:50	50:50	50:50
		- Prosentasi peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP/MTs SMA/MA/ SMK yang tidak melanjutkan	8%	10,40%	13,20%	15,10%	18,32%	20,48%	25%
5	Pencitraan Publik	- Prosentase Temuan Ijzen/BPKP/BPK terhadap penyimpangan	2%	1,50%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%

Pendanaan Indikatif

Pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2008-2013 serta sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan disusun dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku, program-program pembangunan pendidikan dan sarannya serta implementasi program ke depan disusun berdasarkan skala prioritas, oleh karena itu pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2008-2013 dapat memberikan andil terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh UU nomor 20 tahun 2003.

Selanjutnya pembiayaan program pembangunan pendidikan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; penguatan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik diharapkan bersumber dari dana APBD dan APBN, untuk tahun anggaran 2007 dari APBD Provinsi anggaran pendidikan telah mencapai 20%.

Alokasi anggaran pembangunan pendidikan tahun 2008 s.d. 2013 dan perkiraan anggaran indikatif

No	Program	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
		APBD Prov	APBN	APBD Prov	APBN	APBD Prov	APBN	APBD Prov	APBN	APBD Prov	APBN	APBD Prov	APBN
1	PAUD	1.890	1.656	6.413	7.200	2.200	8.424	8.480	12.984	9.246	15.780	18.560	18.250
2	Wajar Dikdas 9 Tahun	42.595	450.225	205.967	612.944	183.896	741.953	265.041	752.846	326.542	784.824	380.560	840.500
3	Pendidikan Menengah	111.991	63.273	147.000	85.000	324.213	87.874	478.151	93.620	492.044	95.899	520.670	130.460
4	Pendidikan Non Formal	3.987	27.249	13.197	32.030	3.700	39.409	11.440	39.845	13.197	41.650	15.750	45.650
5	Manajemen Layanan Pendidikan	2.493	2.127	4.623	4.826	6.650	4.836	4.623	5.200	5.240	5.350	5.600	6.450
6	PMPTK	25.809	104.073	36.800	256.000	18.900	305.740	28.030	456.000	30.246	520.640	36.880	598.750
	Program	188.765	648.603	414.000	998.000	539.559	1.188.236	795.765	1.360.495	876.515	1.464.143	978.020	1.640.060

BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN

Pembaharuan dan kebijakan di bidang pendidikan selalu menandai dinamika dunia pendidikan. Pengeluaran kebijakan yang baru disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi . Selain itu juga menyesuaikan kebijaksanaan yang lebih tinggi seperti pemberlakuan desentralisasi sistem pemerintahan yang diikuti dengan desentralisasi pendidikan dan juga penerapan manajemen berbasis sekolah dalam rangka meletakkan pondasi bagi penyelenggara pendidikan dimasa datang yang berbasis sekolah dan masyarakat.

Implementasi dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat secara bersama-sama mengembangkan pendidikan. Dengan demikian keberhasilan pendidikan bukanlah keberhasilan pemerintah semata-mata, tetapi merupakan keberhasilan bersama, sehingga semua masalah yang muncul dalam pendidikan harus dicari solusinya bersama-sama dan menjadi tanggung jawab bersama-sama.